

PEMBANGUNAN PERDESAAN

REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN EKONOMI



Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)
Oktober 2004

Pengantar Ketua Umum PP. Perhepi

Alhamdulillah, menindaklanjuti hasil konpernas XIV dan Kongres XIII PERHEPI pada tanggal 28-30 Mei 2004 yang lalu, pengurus pusat bersama-sama segenap anggota Perhepi telah dapat melaksanakan serangkaian kegiatan, baik berupa diskusi, seminar, *round-table*, maupun kegiatan profesi lainnya dengan cukup produktif. Mengisi kiprah perhimpunan saat ini dan untuk keperluan mendatang, berbagai pemikiran tersebut dapat dituangkan dalam buku PEMBANGUNAN PERDESAAN:REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN EKONOMI ini.

Sebagai suatu kompilasi pemikiran dari segenap anggota PERHEPI, buku ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dari profesi dan pemerhati ekonomi pertanian pada bangsa dan Negara, terutama bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan dalam menyongsong masa depan pertanian dan perdesaan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

Dalam beberapa sudut pandang, substansi buku ini sangat terbatas. Walaupun demikian, buku ini telah diwujudkan sebagai buah kerja keras rekan-rekan pengurus pusat dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih atas kerja keras tersebut. Kita yakin, hanya dengan kerja keras, dedikasi dan komitmen yang tinggi, PERHEPI akan lebih bermakna bagi pengembangan profesi, ilmu pengetahuan dan pemikiran konstruktif pembangunan bangsa dan Negara.

Jakarta 1 Oktober 2004

Noer Soetrisno

Daftar Isi

Pengan Ketua Umum PP PERHEPI

I	Pendahuluan.....	1
II	Pemikiran ke Arah Pembangunan Pertanian Dan perdesaan di Masa Depan	5
III	Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial.....	24
IV	Reposisi Kelembagaan Ekonomi Dalam Restrukturisasi Pertanian dan Perdesaan	51
V	Wajah Koperasi Tani dan Nelayan di Indonesia Suatu Ilustrasi.....	93
VI	Koperasi Produsen Susu Sebagai Model Klaster Agroindustri Peternakan : Suatu Ilustrasi	99
VII	Penutup.....	110

I

Pendahuluan

Sejak lahir 13 Februari 1969, PERHEPI telah menetapkan dirinya sebagai perhimpunan masyarakat profesi ekonomi pertanian (*society of agricultural economics*) yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang ada hubungannya dengan ekonomi pertanian. Oleh karenanya, fokus kiprahnya ada pada tiga bidang utama, yaitu (a) memajukan dan mengembangkan ilmu ekonomi pertanian, (b) mengamalkan ekonomi pertanian bagi pembangunan bangsa dan Negara, dan (c) memperluas dan memperdalam pengetahuan dan pengalaman para anggota dalam ilmu ekonomi pertanian, untuk bekal sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan Negara.

Bagi PERHEPI, ilmu ekonomi pertanian dianggap sebagai **ilmu perjuangan**. Walaupun melalui masa-masa pasang surut organisasinya, dengan konsepsi-konsepsi dan tulisan-tulisannya senantiasa PERHEPI berjuang membela/memihak petani dan masyarakat pertanian kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih adil melalui peningkatan produktivitas dan pendapatannya. Untuk sekedar contoh, masih kita ingat keberhasilan “pembelaan PERHEPI” dalam penetapan harga padi ditahun 70-an dengan Rumus Tani, ketidaktepatan kebijakan Inpres 9/1975 dalam bagi hasil gula petani di tahun 1980-an, “reaksi PERHEPI” terhadap strategi industrialisasi besar-besaran yang “mengacuhkan” pertanian dan kemiskinan di perdesaan di era 90-an dan seterusnya.

Tema Konpernas 2004 yang baru-baru ini dilaksanakan yaitu **Hari Depan Petani dan Pertanian: Rekonstruksi dan Restrukturisasi**, adalah potret keprihatinan PERHEPI terhadap dinamika bangsa dan Negara yang sedang dialami saat ini, khususnya dalam pembangunan pertanian. Indonesia pada dasarnya adalah Negara agraris, Negara dengan sumberdaya dasar pertanian. Dengan demikian pembangunan (ekonomi) Negara ini seharusnya berkembang atas dasar kemampuan sumberdaya pertaniannya. Akan tetapi, tampaknya pertanian saat ini masih di pandang ‘sebelah mata’ oleh sementara pihak, walaupun PERHEPI telah seringkali mengingatkan ungkapan Presiden Soekarno di tahun 1952 di Bogor:..... *pertanian dan pangan adalah hidup matinya bangsa ini.....* Bagi, PERHEPI masa depan bangsa tidak sekedar mampu keluar dari himpitan krisis ekonomi saat ini, akan tetapi harus ada upaya-upaya mendasar bangsa ini untuk “merekonstruksi” kembali kebijakan-kebijakan nasionalnya, agar petani dan pertanian dapat menyongsong hari depannya secara lebih baik dan lebih sejahtera.

Rekonstruksi yang diharapkan PERHEPI adalah berkaitan dengan bagaimana keberpihakan kepada petani dan pertanian secara nasional dapat diintegrasikan pada setiap kebijakan, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Hal ini berarti, skema kebijakan makro (baik moneter maupun fiscal) harus terkait erat dengan pembangunan pertanian. Demikian pula, kebijakan mikro dan wilayah harus mampu mengintegrasikan iklim kondusif pembangunan agribisnis perdesaan Dukungan dan pemihakan pemerintah secara

tepat menjadi keharusan bagi pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani mendatang, baik dalam infrastruktur, pembiayaan maupun riset dan teknologi. Hanya dengan cara demikian, pertanian akan kembali berkembang lestari dengan sekaligus meningkatkan posisi tawar petani dan mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Restruksi pertanian menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan produktivitas, nilai tambah dan keadilan. Bagi PERHEPI, upaya mendasar yang harus dilakukan adalah peningkatan kepadatan investasi dalam setiap luasan atau unit kegiatan pertanian melalui teknologi dan skala; menurunkan biaya transaksi, resiko dan ketidakpastian produksi, distribusi maupun pasar; serta mengaransir kembali modal sosial dan kelembagaan yang diyakini akan mampu memperkuat posisi tawar petani.

Permasalahan ekonomi pertanian yang berkembang sangat populer akhir-akhir ini (contohnya pada kasus gula impor tidak ilegal, persoalan produksi nasional dan impor beras, maraknya buah-buahan impor dan lainnya) bagi PERHEPI haruslah diletakkan pada kerangka keperluan merekonstruksi dan merestrukturisasi pertanian secara komprehensif. Manakala permasalahan tersebut hanya dipandang secara parsial dengan dimensi yang sempit, justru, akan memunculkan resultan yang tidak dikehendaki dan hanya akan menambah kerumitan dan persoalan baru yang tidak perlu terjadi.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, PERHEPI mengompilasi pemikiran-pemikiran yang berkembang baik dari berbagai rapat kerja, diskusi, seminar, maupun pertemuan-pertemuan lainnya dalam suatu masukan komprehensif bagi keperluan pembangunan pertanian mendatang, yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh penentu kebijakan dalam masa 2004-2009, dan diharapkan menjadi bahan rujukan atau *platform* bagi pemerintah yang terbentuk nantinya. Pemikiran tersebut oleh PERHEPI akan dituangkan dalam dokumen buku ini, yang pada intinya merupakan upaya untuk melakukan PEMBANGUNAN PERDESAAN:REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN EKONOMI.

II

Pemikiran Ke Arah Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Masa Depan

Sebagai perhimpunan profesi yang tumbuh dengan kelenturan yang sangat tinggi dalam keanggotaannya, PERHEPI berkembang menjadi organisasi dengan “pintu terbuka” bagi mereka yang meminati ilmu dan pembangunan ekonomi pertanian, tanpa harus tersekat oleh latar belakang akademik atau pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, keanggotaan perhimpunan ini menjadi sangat luas rentang akademik dan profesinya. Ada latar belakang pendidikan sosial ekonomi pertanian, teknologi pertanian, ilmu pangan dan gizi, teknik industri, lingkungan, demografi, statistik dan lainnya. Ada latar belakang profesi dosen, birokrat, peneliti, penyuluh, pengusaha, konsultan, LSM, dan lainnya. Tidak jarang pula dijumpai seorang anggota PERHEPI menjadi anggota profesi lainnya. Interaksi dengan disiplin dan latar belakang profesi lain merupakan pengkayaan bagi penelusuran permasalahan dan perumusan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi pertanian. Walaupun demikian, pemikiran-pemikiran PERHEPI tampaknya tetap konsisten dalam memandang pertanian: berawal dari ekonomi, dan berakhir pada aspek yang sama.

Dengan keragaman latar belakang dan profesi tersebut, PERHEPI mengembangkan dirinya dalam berbagai pemikiran pengembangan ilmu dan pembangunan ekonomi pertanian secara nasional. Buah pikiran tersebut dalam banyak hal diperoleh melalui berbagai diskusi, seminar, lokakarya dan konperensi.

Mencermati sejarahnya, konperensi nasional (konpernas) adalah ajang yang dapat diberi predikat sebagai *denominator* pemikiran-pemikiran para anggota PERHEPI dan peminat-pemikir ekonomi pertanian secara nasional dalam memandang persoalan pertanian di sekitar kurun waktu bersangkutan. Jika ini benar, maka tema, diskusi pembahasan dan rumusan masing-masing konpernas adalah dinamika pemikiran PERHEPI pada setiap kurun waktu itu. Oleh karena itu, walaupun sangat terbatas, di bawah ini dicoba untuk merangkum berbagai pemikiran yang berkembang pada masing-masing konpernas yang telah dilakukan PERHEPI sebelum ini.

Masa Awal Kelahiran PERHEPI Hingga Tahun 1980-AN

Dalam kurun waktu ini, tepatnya sejak 1964 sebelum terbentuknya PERHEPI hingga awal 1980-an telah diselenggarakan enam konpernas ekonomi pertanian. Enam konpernas tersebut diselenggarakan di enam kota dan lima pulau yang tidak sama, diawali dari Bogor pada konpernas I dan diakhiri di Medan dengan konpernas ke VI. Diantara itu, konpernas diselenggarakan berturut-turut di Bukit tinggi (sumatera), Ujung Pandang (Sulawesi), Balikpapan (Kalimantan), dan Jakarta. Dalam kurun waktu ini, tampaknya para ekonom pertanian ingin “memahami” problema-problema dan

“tantangan” masing-masing wilayah dalam pembangunan pertanian. Sesuai dengan era saat itu, pemikiran dan pembahasan lebih pada keinginan menghasilkan konsepsi-konsepsi pembangunan pertanian, terutama konsepsi tentang bagaimana meningkatkan produksi pangan. Pembangunan pertanian masa itu lebih dilihat sebagai persoalan produksi pangan. Dengan cara pandang masa itu, muncullah konsepsi pemikiran yang sangat populer : intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian. Pembangunan pertanian masa itu sepertinya lebih berisi masalah-masalah pemenuhan saprotan seperti pengairan, pupuk, obat-obatan, teknologi tepat, dan upaya-upaya penyuluhan. Konsep-konsep kebijakan seperti Inmas dan Bimas adalah buah dari pemikiran peningkatan produksi oleh PERHEPI masa itu.

Walaupun fokus perhatian berkisar pada pemikiran tentang peningkatan produksi, berbagai masalah penting lain mulai banyak memperoleh perhatian, seperti dampak serius tergesernya tenaga kerja pertanian akibat inovasi teknologi, terutama alam pengolahan lahan. Gejala fragmentasi lahan di satu sisi dan polarisasi penguasaan lahan di sisi lain, ketimpangan distribusi pendapatan petani dan sektoral, adalah beberapa isu yang juga muncul saat ini, bahkan semakin kompleks dengan bergesernya struktur ekonomi nasional dari agraris ke industri.

Masa Dasawarsa 1980-1990-AN

Tercatat, ada tiga konpernas dilakukan PERHEPI dalam kurun masa ini. Konpernas VII pada tahun 1982 di Jakarta, konpernas VIII di Yogyakarta pada 1985 dan konpernas ke X kembali di Jakarta pada 1989. Menurut catatan, PERHEPI tidak menyelenggarakan konpernas ke XI (dan juga kongres ke VIII).

Pada kurun masa itu, secara nasional kita meraih hasil dari upaya-upaya peningkatan produksi pertanian (khususnya padi) berdasarkan konsepsi peningkatan produksi yang dituangkan sebagai kebijakan sebelumnya. Swasembada beras kita raih. Kisah sukses ini ternyata diikuti oleh masalah baru di bidang lingkungan. Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam memprihatinkan pembangunan pertanian masa depan. Hal ini secara dini telah menjadi pemikiran PERHEPI, yang dalam Konferensi Internasional Ekonomi Pertanian di Jakarta bulan Agustus tahun 1982 mengetengahkan tema *Growth and Equity in Indonesian Agricultural Development*. Pada tahun yang sama, bahkan Konpernas PERHEPI VII secara khusus menyoroti masalah pertumbuhan dan pemerataan, karena kekhawatiran terjadinya perkembangan pembangunan pertanian Indonesia yang tidak menjurus ke arah ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan yang serasi.

Setelah itu pemikiran para ekonom pertanian mengerucut pada bagaimana pembangunan pertanian dapat berkelanjutan (*sustainable*), dan tidak semata-mata bertumpu pada peningkatan produksi. Konpernas X di penghujung akhir dasawarsa 80-an (1989) secara jelas mengambil tema Diversifikasi Pertanian Dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional.

Pemikiran PERHEPI saat itu mulai membicarakan tema pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, dikaitkan dengan pendapatan petani. PERHEPI saat itu berpendapat

bahwa usahatani konservasi sangat penting dilakukan, terutama didataran tinggi (*up land*), karena diharapkan dapat sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya sumberdaya air dan tanah. PERHEPI juga menyoroti masalah penyempitan penguasaan lahan petani sebagai akibat fragmentasi lahan dan pesatnya perkembangan industri. Perluasan penggunaan sumberdaya lahan dengan pemanfaatan lahan rawa (lebak dan pasang surut) yang banyak terdapat di berbagai wilayah bagi usaha pertanian menjadi saran untuk dikembangkan. Diversifikasi pertanian secara mendalam, baik dari sisi teoritis maupun operasional, juga telah menjadi instrument strategis yang disarankan untuk mendorong dan memperluas pembangunan pertanian ke arah pertumbuhan agroindustri, peningkatan pendapatan dengan sekaligus mengatasi pengangguran.

MASA DASAWARSA 1990-2000-AN

Pemikiran PERHEPI dalam kurun masa ini merupakan kompilasi penyelenggaraan tiga konpernas: Konpernas XI pada tahun 1993 di Jakarta, Konpernas XII di Denpasar pada 1996 dan Konpernas ke XIII kembali di Jakarta pada awal 2000. Seminar Nasional pada tahun 1995 juga dilakukan oleh PERHEPI dalam rangka menyongsong setengah abad kemerdekaan Negara kita.

Dilihat dari pemikiran yang berkembang, ada dua tema besar yang menandai masa ini, yaitu pengentasan kemiskinan dan pengembangan daya saing pertanian dan perdesaan dalam liberalisasi ekonomi. Pengentasan kemiskinan diyakini PERHEPI akan merupakan salah satu solusi dan prasyarat bagi pembangunan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Berbagai aspek yang menjadi perhatian dalam rangka itu adalah pemasaran, infrastruktur, kelembagaan, investasi, dan keseimbangan antar sector dan antar wilayah.

Model peningkatan pendapatan dari usaha pertanian yang lebih komersial (*commercial crops*) bernilai tinggi yang bersifat padat teknologi dan hemat lahan ditawarkan sebagai alternatif. Oleh karena itu, Pembangunan pertanian dalam konteks agribisnis dan agroindustri mulai memperoleh perhatian. Pemasaran, teknologi dan sumberdaya pertanian diyakini menjadi factor kunci menuju kemandirian dan daya saing pertanian dalam menghadapi era industrialisasi dan perdagangan bebas. Perwujudannya membutuhkan pendekatan multi-disiplin dan lintas sektor secara terpadu.

Dalam rangka menyongsong setengah abad kemerdekaan misalnya, seminar nasional PERHEPI 1995 memberikan sumbang saran bertema Meningkatkan Peningkatan Pertanian dan Perdesaan Indonesia Guna Memenangkan Persaingan Dalam Perdagangan Bebas Pasca 2020. Setahun kemudian, Konpernas XII PERHEPI di Denpasar pada tahun 1996 melanjutkannya dengan tema yang selaras, yaitu Membangun Kemandirian dan Daya Saing Pertanian Nasional Dalam Menghadapi Era Industrialisasi dan Perdagangan Bebas.

Inti pemikiran yang dirumuskan adalah kebutuhan suatu pendekatan multi disiplin dan lintas sectoral secara terpadu, di dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing pertanian nasional. Isyu-isyu penting yang menjadi perhatian dan pembahasan adalah pembangunan sumberdaya manusia, teknologi dan produksi, pemasaran dan perdagangan, serta persoalan-persoalan daerah dan kewilayahan. Agribisnis dipandang sebagai suatu wawasan sekaligus strategi yang dapat membingkai dan menghantarkan pertanian dan perdesaan dari suatu tingkatan produktivitas dan efisiensi ke tingkatan yang lebih tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan arus perdagangan bebas. Untuk itu, diperlukan dukungan dalam bidang riset, pengembangan SDM dan manajemen pembangunan pertanian di lapangan, seperti pengembangan system manajemen usaha, kemampuan wirausaha, keterpaduan pembangunan, pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan karakteristik spesifik lokasi dan partisipasi masyarakat.

Mengakhiri abad ke 20, Konpernas PERHEPI XII di Jakarta awal tahun 2000 melanjutkan pemikiran-pemikiran sebelumnya, dengan mengamati perubahan manajemen ketatanegaraan, yaitu otonomi daerah. Tema yang diketengahkan dalam konpernas tersebut adalah Pembangunan Pertanian Dalam Era Otonomi Daerah dan Liberalisasi Peradagang. Ada tiga butir memorandum hasil konpernas ini, yang dipandang penting bagi pemikiran pembangunan pertanian masa depan. Pertama, liberalisasi perdagangan yang bertujuan menciptakan *fair trade* merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, kebijakan yang harus diambil adalah menghindarkan dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan, pembangunan pertanian dalam era otonomi daerah memerlukan pemahaman kondisi lokal wilayah, koordinasi antar daerah dalam infrastruktur dan SDM, sehingga tetap efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ketiga, pembangunan pertanian mendatang harus tetap berbasis asas berkelanjutan dan bertumpu pada pengembangan SDM pertanian, sehingga peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama dan suatu keharusan. Untuk itu, diperlukan proses peningkatan, produktivitas, motivasi, inovasi, dan kelembagaan bagi pengembangan kinerja petani dan pertanian perdesaan.

Perlunya Rekonstruksi Dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian Dan Perdesaan

Konperensi Nasional PERHEPI ke XIV diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28-30 Mei 2004, dihadiri segenap utusan komisariat-komisariat PERHEPI, para pakar dan pemerhati ekonomi pertanian, lembaga pemerintahan, masyarakat dan undangan lainnya. Ditengah-tengah persiapan bangsa ini melaksanakan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung setelah pemilu legislatif, konpernas dilaksanakan dengan tema sentral **Hari Depan Petani dan Pertanian: Rekonstruksi dan Restrukturisasi**. Saat itu tampaknya sebagian besar insan perhimpunan profesi ini merasakan keprihatinan yang sama akan masa ini dan masa mendatang kehidupan petani dan pembangunan pertanian nasional.

Menyongsong konperensi nasional tersebut, PP. PERHEPI sengaja menerbitkan sebuah buku dengan judul **Rekonstruksi dan restrukturisasi Ekonomi Pertanian** yang berisi 20 artikel para pakar, pemikiran dan pemerhati ekonomi pertanian yang merupakan

anggota PERHEPI dari berbagai komisariat. Artikel-artikelnya sengaja diselaraskan dengan tema Konpernas dan lebih berkenaan dengan keprihatinan terhadap dinamika bangsa dan Negara yang sedang dialami saat ini, khususnya dalam pembangunan pertanian.

Pembahasan subtema **Hari Depan Petani dan Pertanian Indonesia** banyak mempertanyakan potret dinamika kehidupan petani dan pembangunan pertanian pada berbagai masa, dan suramnya masa depan petani dan pertanian Indonesia. Indonesia pada dasarnya adalah Negara agraris, Negara dengan sumberdaya dasar pertanian. Dengan demikian, pembangunan (ekonomi) Negara ini seharusnya berkembang atas dasar kemampuan sumberdaya pertaniannya. Perjalanan sejarah sejak kemerdekaan memang menunjukkan berbagai dinamika pembangunan ekonomi nasional bangsa ini. Ada pasang dan ada pula surutnya. Berbagai catatan kisah sukses pertanian pernah dilalui, sejak peningkatan produksi dan produktivitas berbagai komoditas baik tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura maupun perikanan, hingga tercapainya swasembada pangan beras dan gula di tahun 80-an. Sebaliknya kerumitan permasalahan tidak juga semakin reda, sejak masalah-masalah infrastruktur, kelembagaan, tataniaga, SDM, ketenagakerjaan, hingga kepada masalah kesiapan memasuki globalisasi dan daya saing.

Pertanianpun dalam berbagai masa GBHN senantiasa menjadi *backbone* strategi pembangunan ekonomi nasional. Berbagai persoalan besar bangsa seperti peningkatan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan wilayah, kesempatan kerja, peningkatan ekspor, dan pemeliharaan lingkungan, ditumpukan pada kinerja pembangunan pertanian. Sungguh besar peran strategis ekonomi pertanian dilihat dari kaca mata tersebut. Namun ironisnya, sampai saat ini, hampir 60 tahun sejak kemerdekaan justru catatan tingkat pendapatan dan kesejahteraan para petani, peternak, pekebun dan nelayan tidak pernah beranjak lebih baik secara riil dibandingkan pelaku pembangunan lainnya. Nilai tukar penghasilan riil mereka stagnan atau justru semakin menurun, kesempatan berusaha di bidang pertanian semakin sulit dan rumit karena semakin menyempitnya sumberdaya fisiknya, infrastruktur dan teknologi yang cenderung tidak bertambah dan tidak bersaing, serta lingkungan internal maupun eksternal yang semakin tidak *friendly* terhadap pertanian.

Pembahasan berkembang dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan atas jawaban pertanyaan : Adakah yang salah dengan pertanian kita? Adakah yang salah pada bangsa ini meletakkan praksis kebijakan, rasionalitas, dan bahkan filosofi pertanian dalam perjalanan pembangunannya? Atau memang sedemikian suramkah masa depan bangsa ini jika mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung pembangunan ekonominya?

Selanjutnya, pembahasan subtema **Perencanaan Pembangunan Pertanian** lebih dikaitkan dengan berbagai perubahan ketenagakerjaan dan keputusan politik bangsa pasca amandemen Undang-Undang 1945, otonomi daerah dan tekanan liberalisasi. Perencanaan sebagai bagian penting dalam manajemen pembangunan (pertanian) pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk mencapai perubahan ke arah tujuan yang ingin dicapai mendatang. Upaya tersebut sangat tergantung pada seberapa besar kapasitas sumberdaya sebagai modal dasar masukan, seberapa besar kemampuan menekan

penyimpangan dari perencanaan yang ditetapkan. Permasalahan umum yang sangat memperhatikan selama ini dalam pembangunan pertanian adalah besarnya kesenjangan antara realitas dan harapan. Dampak yang seringkali dijumpai adalah kesenjangan kinerja pembangunan pertanian antar Jawa dan Luar Jawa, pangan dan non-pangan pembangunan ekonomi (pertanian) dan pelestarian lingkungan, kecilnya *trickle down* sekaligus besarnya fenomena *backwash effect* dan pengurasan sumberdaya *hinterland* oleh pusat-pusat pertumbuhannya, yang pada akhirnya memarginalkan para petani subyek pembangunan pertanian. Bahkan agribisnis yang selama hampir dua decade ini menjadi *national grand strategy* dalam pembangunan pertanian perkembangan tanpa arah dan perencanaan yang jelas, sehingga dalam banyak hal perkembangannya seringkali lebih mengorbankan petani kecil dan kedaulatan masyarakat, ketimbang mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan mereka. Adakah yang salah pada strategi besar pengembangan agribisnis itu?

Globalisasi, era otonomi dan desentralisasi, amandemen UUD 1945, UU 17/2003 tentang keuangan Negara dan berbagai dinamika lainnya telah dan akan membawa konsekuensi dalam mengantisipasi betapa pentingnya masalah perencanaan pembangunan pertanian pada masa mendatang didiskusikan. Globalisasi dan otonomi daerah jelas membawa konsekuensi pentingnya kesiapan SDM dan institusi daerah dalam mengembangkan perencanaan pembangunan (pertanian) nya menuju daya saing yang lebih baik, sementara pemerintah pusat tetap diwajibkan mengantisipasi kualitas pembangunan secara makro, mengeliminasi kesenjangan, dan mempertahankan sendi-sendi kesatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pada itu, amandemen UUD 1945 jelas memberi konsekuensi logis ketiadaan GBHN sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional, dan serta merta tergantikan oleh “platform atau visi dan rencana” presiden/pemerintahan hasil pemilihan umum. Ada beberapa implikasi sekaligus pertanyaan yang sangat penting misalnya (a) akankah setiap 5 tahun sekali ada “platform” baru, dan bagaimana dengan cakrawala perencanaan jangka panjang yang berkenaan dengan pembangunan pertanian seperti teknologi, SDM, *institution building* dapat dibangun? Bagaimana konsistensi dan berkelanjutan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dapat terjamin? Dengan cara bagaimana investasi dan pembiayaan pembangunan pertanian sebagai sumber pertumbuhan dapat terkosolidasi? (b) bagaimana membangun institusi perencanaan pembangunan [pertanian] dalam lingkungan desentralisasi yang semakin tinggi akan tetapi sekaligus memungkinkan kapabilitas koordinasinya? (c) Siapa, dengan cara apa, atas dasar legitimasi apa dan bagaimana mekanisme tahapan perencanaan serta akuntabilitas pembangunan [pertanian] mendatang?

Subtema ini terutama mengharapkan pembahasan pada berbagai masalah kritis dalam perencanaan pembangunan (pertanian), sekaligus dapat memberikan landasan pemikiran tentang arah, mekanisme dan proses perencanaan pembangunan, terutama pembangunan pertanian, dalam mewujudkan cita-cita bangsa ke depan.

Perdagangan Internasional, *supply chains management*, Kelembagaan dan pendidikan/ penyuluhan Pertanian menjadi bagian akhir subtema diskusi dalam Konpernas. Liberalisasi perdagangan, khususnya bagi produk-produk pertanian telah banyak membawa implikasi pada perkembangan pertanian di dalam negeri. Daya saing,

baik produktivitas maupun efisiensi menjadi isu utama pembangunan pertanian saat ini, sementara, “regulasi” internasional telah dan sedang terus mengarah kepada ketidakadilan antara Negara maju dan Negara berkembang, sebagai akibat proteksi dan berbagai macam politik dan hambatan perdagangan dalam bidang pertanian, baik secara teknis maupun non teknis. Keseluruhan dinamika dan “regulasi” global tersebut, cepat ataupun lambat akan ditransmisikan dan berpengaruh kepada perkembangan pertanian di dalam negeri. Pembahasan meliputi perkembangan pengaturan perdagangan internasional dalam hal produk-produk pertanian dan yang berkenaan dengan pertanian pada umumnya. Dinamika tersebut pada gilirannya akan menyangkut tentang bagaimana dinamika sistem distribusi produk-produk pertanian, yang dengan sangat dinamis telah (hampir) menjadi budaya bagi sistem pasar produk saat ini, dengan *supermarket supply chains revolution*. Bagaimana dinamika-dinamika tersebut berdampak bagi para petani?

Social and Organizational Capital merupakan potensi pertanian. Ini menunjukkan bahwa *institutional building* seharusnya merupakan “sumberdaya” yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan. Khusus di bidang pertanian, pengalaman telah cukup lama di dalam *institutional building*, baik berupa sosok Koperasi maupun berbagai kelembagaan pertanian lainnya. Kelembagaan-kelembagaan tersebut diharapkan mampu menjadi *receiving system* sekaligus memperbesar peluang bagi peningkatan kesejahteraan para petani.

Perjalanan panjang koperasi di Indonesia penuh dinamika, dan seringkali kurang memperoleh perhatian para ekonom pertanian. Satu dan lain sebab, karena sejarah pembinaan koperasi masa lalu yang sangat *top-down* justru mematikan sukma koperasi itu sendiri, karena menjauhkannya dari kemampuannya menumbuhkan inovasi, inisiatif dan *self-empowering*.

Jaman telah berubah, dan nafas daya saing semakin menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian. Lalu bagaimanakah masa depan koperasi dihadapkan pada situasi demikian? Bagaimana pengembangan kelembagaan petani selama ini dikaitkan dengan *social and institutional capital* tersebut? Bagaimana potret koperasi dan kelembagaan pertanian dalam sistem dan usaha agribisnis saat ini? Perbaiki citra dan revitalisasi yang bagaimanakah dibutuhkan bagi koperasi dan kelembagaan ekonomi pertanian masa depan?

Dampak dari rendahnya jumlah dan kualitas SDM sektor pertanian menjalar di setiap segmen agribisnis. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan manajemen, prasarana dan teknologi, kurang lancarnya penyerapan informasi dan teknologi dan pada gilirannya kemampuan jangkauan wawasan yang terbatas. Di lain pihak, kuantitas dan distribusi aparat pembuat kebijaksanaan, Pembina dan pelayan serta penyuluh pada masing-masing Lembaga teknis masih sangat terbatas dan belum merata pada setiap unit kerja. Berdasarkan struktur pendidikan yang ada, menunjukkan gambaran piramida yang sangat melebar ke bawah dan menyempit keatas akan tetapi tidak meruncing, hal ini tercermin dari relative sedikit jumlah tenaga mempunyai pendidikan tinggi.

Pada dasarnya, karya membangun SDM pertanian itu berspektrum luas sehingga mencakup keseluruhan pelaku masyarakat/pedesaan, masyarakat dunia iptek. Semua lapisan masyarakat agribisnis perlu melakoni proses perubahan perilaku yang relevan dengan kebutuhan sistem agribisnis yang “relative” baru, melalui suatu mekanisme proses belajar yang menjadi asas bekerjanya karya penyuluh pertanian moderen. Dalam karya membangun SDM yang mengacu kepada proses transformasi ini, lembaga pendidikan formal seharusnya menunjukkan relevansi melalui penyediaan alumninya berdasarkan kompetensi yang dibangunnya.

Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa pada saat ini pertanian dihadapkan pada dua dilema besar, yaitu (a) lemahnya kinerja penyuluhan pertanian, yang pada masa lalu menjadi ujung tombak di dalam pencapaian Swasembada beras, dan (b) kurangnya dukungan sistem pendidikan nasional yang belum sepenuhnya mengarah pada kurikulum berbasis kompetensi. Kedua dilema besar tersebut, secara sarkastis telah sampai pada jargon pertanian masa kini:”penyuluhan telah mati”.

Dalam menopang upaya tersebut di atas maka sangatlah perlu upaya tersebut di atas maka sangatlah perlu memikirkan suatu model (sistem) pelatihan, penataran ataupun penyuluhan sebagai upaya “*transfer of agribusiness knowledge*” di tingkat petani. Oleh Karena itu, diskusi diharapkan sampai pada tinjauan kritis pada kedua masalah di atas, sehingga sampai pada upaya-upaya pemikiran tentang (a) bagaimana meredefinisikan, merestrukturisasi, dan merekonstruksi ulang penyuluhan pertanian, dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berwawasan agribisnis, (b) bagaimana mendorong suatu sistem pendidikan (berbasis ilmu-ilmu pertanian)menuju kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan penyuluhan dan informasi pembangunan pertanian, dan (c) bentuk kelembagaan dan organisasi penyuluhan pertanian yang bagaimanakah yang sesuai dengan pertanian moderen di era desentralisasi?

Itulah keseluruhan subtansi umum yang diungkapkan dalam sidang-sidang dan pembahasan konperensi nasional di tahun 2004 yang lalu. Dari pembahasannya, dirumuskan butir-butir konsepsional yang direkomendasikan konperensi nasional tersebut, yaitu:

Kebutuhan,Potensi dan Permasalahan Pertanian

1. Kebutuhan bagi Pembangunan Pertanian di Indonesia dapat digambarkan dengan ungkapan : “**...pertanian dan pangan adalah hidup matinya bangsa ini...**” (Soekarno,1952). Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pertanian terkait erat dengan hal-hal paling mendasar bagi kemanusiaan seperti:
 - a. Pengurangan kemiskinan;
 - b. Upaya mengatasi pengangguran;
 - c. Usaha membangun ketahanan pangan, yang tidak hanya dilihat dari penyediaan produk pangan tetapi juga dilihat dari pendapatan untuk membeli pangan;
 - d. Usaha pelestarian lingkungan; dan
 - e. Pembangunan basis ekonomi daerah.

2. Potensi pembangunan pertanian pada dasarnya terdapat di dalam pertanian itu sendiri. Potensi pertama dan utama adalah pada adalah petani dan masyarakat Indonesia. Aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat ---khususnya para petani dan masyarakat perdesaan--- merupakan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan permintaan pasar domestic juga telah menarik perhatian hampir semua pebisnis pangan-pertanian dunia. Kita sering lalai akan potensi tersebut, sehingga pertanian tertinggal, bahkan justru kita dieksploitasi pihak lain dalam suasana ketidakadilan dan ketidak-arifan. Disamping itu, potensi besar terdapat pada karunia Tuhan YME. Dengan sumber daya alam yang berlimpah. Sayangnya potensi tersebut telah dieksploitasi secara tidak bijaksana dengan mengabaikan kaidah-kaidah lingkungan dan kearifan lokal, baik karena terpaksa akibat penambahan penduduk maupun karena tindakan yang didorong oleh keserakahan dan ketidak-adilan.
3. Akibatnya, pertanian Indonesia telah dan masih terus termarginalisasi. Berbagai permasalahan berat yang selama ini dihadapi dan berbagai kondisi buruk yang dihadapi petani dan pertanian masih dan akan terus berlangsung, terutama dalam ketidakadilan dan ketidak-berdayaan dalam berbagai aspek. Marginalisasi pertanian adalah juga penyebab betapa sulitnya Indonesia untuk segera menjadi Negara maju, berdaulat, dan terhormat. Ditengah marginalisasi pertanian itu, ternyata pertanian masih tampil dan memberi kontribusi positif bagi ekonomi nasional.
4. Ketidak-adilan tersebut tercermin dari rendahnya akses pelaku usaha pertanian pada sumberdaya produktif, seperti teknologi, permodalan, informasi, pasar dan *'human capital improvement'*. karenanya, membuka akses pada sumberdaya produktif tersebut merupakan salah satu bentuk keadilan dan keberpihakan yang nyata pada petani.

Hari Depan Tergantung Pada Rekontruksi dan Restrukturisasi pertanian

5. Rekonstruksi dan restrukturisasi pertanian dan pembangunan pertanian merupakan upaya mendesak dilakukan, demi masa depan petani dan pertanian yang juga merupakan masa depan bangsa Indonesia secara keseluruhan Rekonstruksi dan restrukturisasi pertanian mencakup :
 - a. Rekonstruksi dan restrukturisasi **cara berfikir** untuk dapat melihat pertanian secara lebih profesional. Pertanian bukan hanya menyangkut komoditas, dan pembangunannya, juga bukan hanya untuk kepentingan pertanian sendiri. Pertanian memiliki dimensi-dimensi yang sangat luas dan kompleks, sekaligus penting.
 - b. Rekonstruksi dan restrukturisasi **sikap dan kepedulian** terhadap pertanian. Sikap dan kepedulian terhadap petani diwujudkan dengan memberikan apresiasi dan mendayagunakan kekuatan dinamika rakyat; serta menghindari perlakuan tidak adil dalam berbagai bentuk dan dimensinya. Hal ini harus ditunjukkan oleh rekonstruksi dan restrukturisasi *'political will'*, *'political*

decision’, dan “*political action*” dari para pemimpin dan pengambil keputusan politik.

- c. Rekonstruksi dan restrukturisasi **kerangka pendekatan** dalam melihat sektor pertanian dan pembangunan perdesaan. **Petani harus ditempatkan sebagai focus sekaligus perhatian utama** dalam kerangka pendekatan tersebut. Dengan menempatkan petani sebagai fokus dan subyek maka dimensi kemiskinan, ketidakadilan, ketidakberdayaan, dan keterbatasan petani akan mengemuka sebagai permasalahan pertanian tidak menjadi hanya terbatas pada masalah komoditas. Petani juga tidak boleh dilepaskan dari konteks masyarakatnya, sehingga dimensi sosial budaya, bahkan politik menjadi bagian penting dalam pembangunan pertanian, disamping aspek teknis dan ekonomis. Dengan demikian, **pendekatan kawasan dan wilayah** harus juga menjadi komponen penting dalam kerangka pendekatan pertanian. Disamping itu pertanian juga tetap harus dilihat sebagai **sistem rangkaian nilai komoditas**, atau yang dikenal sebagai sistem agribisnis. Ketiga aspek tersebut kemudian harus menjadi kesatuan yang terkait satu dengan lainnya. Misalnya dalam hal ketahanan pangan atau pengurangan kemiskinan, ketiga aspek tersebut harus dilihat secara komprehensif untuk mendapatkan solusi yang tepat. Sebagai perekat ketiga aspek tersebut adalah aspek-aspek kelembagaan dalam berbagai bentuknya. Disamping itu ketiga aspek tersebut akan sangat ditentukan oleh penempatnya dalam **kerangka global**, dengan tetap memiliki dimensi nasional dan regional yang kental.
- d. Rekonstruksi dan restrukturisasi penggunaan **metode dan teori-teori ilmu ekonomi pertanian** yang akan digunakan dalam melihat, mengkaji, memahami, dan menjelaskan pertanian Indonesia. Sebagai konsekuensi dari ke tiga pendekatan di atas, pendekatan mekanisme pasar tidak akan cukup. Oleh sebab itu pendekatan ekonomi neo-liberal amat terbatas keampuannya dalam memahami persoalan mendasar dan memacu pembangunan pertanian dan perdesaan di Negara berkembang seperti Indonesia. Pendekatan ekonomi kelembagaan, ekonomi politik, dan teori-teori lain sangat diperlukan.
- e. Rekonstruksi dan restrukturisasi **sistem perencanaan pembangunan pertanian** yang mampu memberikan arahan **jangka panjang** (15-20 tahun) maupun **jangka pendek** (1-5 tahun). Hal ini terkait dengan kebutuhan pertanian untuk usaha jangka panjang (perkebunan, industri pengolahan, dan lain-lain); disamping terkait pula dengan rencana pengembangan infrastruktur, pendidikan dan riset. Disamping itu diperlukan pula restrukturisasi keterkaitan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian antara **tingkat nasional dan daerah serta antar daerah**. Kegiatan pertanian memiliki lingkup kewilayahan, baik dalam dimensi ekosistem maupun pasar, yang berbeda dengan lingkup wilayah administrasi.
- f. Rekonstruksi dan restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang melayani dan memfasilitasi pembangunan pertanian. Selain **fungsi pelayanan dan**

fasilitasi dengan prinsip *'good governance'*, birokrasi tersebut harus dapat pula melakukan **fungsi promosi** serta memadukan **penelitian dan penyuluhan** pertanian.

Kebutuhan Penegasan Posisi Politik Pertanian Para Pemimpin

Rekonstruksi dan restrukturisasi pertanian Indonesia akan sangat tergantung pada bagaimana pemimpin bangsa mendudukan pertanian dalam kerangka pembangunan nasional. Harus ada pandangan normatif pemimpin bangsa yang berani mengambil posisi yang jelas dengan sikap :

"....apabila terdapat berbagai kepentingan pembangunan, dan kepentingan yang lain bertentangan dengan keperluan pertanian, maka kepentingan yang lain itu harus ditunda...."

III

Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial

Indonesia mewarisi sejarah panjang dalam hal pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat sejalan dengan banyaknya negeri-negeri kecil dalam kekuasaan adat dan kerajaan yang kemudian dilanjutkan dengan masa panjang penjajahan selama tiga setengah abad secara silih berganti. Hal ini telah melahirkan berbagai macam cara pemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam yang merupakan aset ekonomi terpenting yang melahirkan pola pengorganisasian kegiatan ekonomi. Pada abad ke sembilan belas teori tentang pemahaman masalah perekonomian Indonesia ini diformulasikan oleh J. Boeke dengan *dualism theory*. Potret dualisme ini secara nyata masih tetap hidup dalam perekonomian kita, artinya dilakukan oleh warga bangsa ini, dengan perimbangan yang timpang dalam penguasaan besarnya aset dan perolehan nilai tambah. Keadaan inilah yang sebenarnya telah merisaukan kita semua mengapa sepanjang perjalanan sejarah perekonomian bangsa ini yang terjadi keadaan yang semakin memburuk dan kita tidak pernah ingin melakukan koreksi.

Dalam persepektif penguasaan aset produktif terutama sumberdaya alam, paling tidak ada tiga kelompok yang sering disebut pemilik dari aset produktif tersebut yakni adat, Negara dan privat atau pemilikan perorangan. Untuk yang terakhir pengertian dan penguasaannya serta cara perolehan haknya sangat jelas, namun untuk pemilikan adat dan Negara terdapat wilayah yang kelabu yang menjadi pangkal sengketa dalam sejarah panjang perekonomian kita. Perubahan kekuasaan pada skala lokal dan pusat kekuasaan feodal ketika itu, hingga pada penguasaan oleh pemerintah kolonial dan setelah kemerdekaan masih terus menambah persoalan ini. Semasa orde baru ketika pembangunan menjadikan pertumbuhan makro sebagai indikator penting, maka percepatan eksploitasi sumberdaya alam juga telah melebarkan persoalan panjang dalam mengalihkan status aset ini atas nama “kepentingan Negara” atau “kepentingan umum”.

Strategi pembangunan ekonomi yang mengedepankan indikator ekonomi yang bersifat agregatif ternyata kurang mampu menampung aspirasi kualitatif masyarakat, baik yang bersifat kesejahteraan maupun aspirasi sosial-budaya mereka. Akibat dari kelemahan ini menjadikan instrument yang semula dirancang untuk meratakan dan mensejahterakan masyarakat menjadi hancur berantakan karena adanya ketidakpuasan social seperti kasus transmigrasi, percontakan sawah dan perkebunan serta pembangunan fasilitas perkotaan lainnya. Persoalan ini menjadi kerumitan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan terutama apabila menyangkut kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan pengalihan hak atas aset produktif yang melibatkan masyarakat (adat) dan pemerintah (Negara).

Secara garis besar, kilas balik dari persoalan bangsa yang terjadi selain terkait dengan persoalan diatas juga berhubungan dengan persoalan pembangunan politik dan ekonomi bangsa kita yang berimplikasi pada persoalan sosial. Apabila persoalan ini disandingkan

denang persoalan politik pembangunan yang diharapkan mampu memajukan kehidupan dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, maka sangat relevan untuk memahami problematic perekonomian kita dalam kerangka itu. Sehingga perubahan sistem politik ke depan akan memerlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang baru. Namun hal ini tidak akan menjamin pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, maka sangat relevan untuk memahami problematic perekonomian kita dalam kerangka itu. Sehingga perubahan sistem politik ke depan akan memerlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang baru. Namun hal ini tidak akan menjamin pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan keadilan sosial jika kita tidak mampu memahami dinamika sosial yang sangat kaya dan bersifat lokal spesifik.

Dalam bagian ini disajikan telah empiris persoalan ekonomi Indonesia, terutama jika dilihat dari kacamata landasan keadilan sosial. Selanjutnya pandangan ke depan untuk jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan akan menjadi dasar melihat dimensi politik pembangunan untuk mencapai tujuan dimaksud. Sudah barang tentu kesemuanya itu tidak akan terlepas dari aspek strategik dalam memecahkan persoalan ekonomi masyarakat bangsa ini. Untuk mewujudkan suatu sikap yang utuh dalam hal mengelola perubahan itu maka persoalan kepemimpinan dan komitmen yang disertai dengan penyusunan taktik dan rencana aksi harus disusun agar upaya ini menjadi sebuah gerakan.

Ekonomi Indonesia Setelah

Sebagai kondisi awal untuk melihat pandangan ke depan perlu menetapkan keadaan saat ini yang kebetulan merupakan abad baru sebagai pijakan untuk melihat ke depan. Hal ini tiada lain disadari bahwa masa transisi seharusnya sudah berlalu, meskipun dampak krisis ekonomi masih belum pulih. Di sisi lain dampaknya terhadap kehidupan sosial masih terus berlangsung dan belum menemukan jalan keluar. Paling tidak ujung abad yang lalu telah menempatkan Indonesia dalam sistem baru yang mulai dilangsungkan sebagai bagian dari pelaksanaan hasil kerja. Kabinet Habibie. Pemerintahan Habibie menghasilkan sedemikian banyak keputusan yang merubah arah Indonesia dibanding dengan masa sebelumnya baik semasa kepemimpinan Presiden Soeharto. Paling tidak ada tiga perubahan mendasar yang mempengaruhi perkembangan ke depan tersebut yaitu: *pertama*, dengan dilaksanakannya pemilihan umum multi partai yang demokratis telah membuka jalan baru bagi sistem rekrutmen kepemimpinan nasional dan perubahan konstitusi kita; *kedua* Undang-undang tentang Bank Indonesia telah menempatkan BI sebagai lembaga independen sehingga membatasi ruang gerak pemerintah dalam kebijakan ekonomi dimana antara kebijakan moneter dan fiskal mulai dibagi pusat kekuasaannya yang menempatkan ruang gerak pemerintah untuk menggunakan perbankan bagi pembiayaan pembangunan semakin terbatas dan harus dilakukan secara transparan; dan *ketiga*, dikeluarkannya undang-undang baru UU No 22/1999 tentang pemerintahan daerah memulai babak baru pengaturan otonomi pada daerah kabupaten/kota. Tiga perubahan ini akan sangat menentukan perubahan selanjutnya menuju Indonesia baru, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang sesuai dengan format perubahan itu.

Dalam sistem perekonomian, kita memiliki tiga pemain utama yang biasa disebut sebagai pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen dan pemerintah. Dalam sisi produsen kita mengenal adanya usaha besar, usaha kecil dan usaha menengah sesuai dengan sistem pengelompokan perundangan yang ada. Mengingat usaha kecil merupakan bagian terbesar, maka lapisan terbawah ini terdiri dari usaha mikro yang jumlahnya mewakili 97 persen lebih dari usaha kecil yang ada di tanah air kita. Jumlah unit usaha yang ada pada tahun 2000 telah mendekati jumlah 40 juta unit dan sebagian terbesar atau sekitar 38 juta adalah usaha mikro. Pengelompokan ini sendiri masih menyisakan keberadaan usaha informal yang dalam masa krisis menjadi tumpuan untuk menyelamatkan kegiatan perekonomian kita. Dalam konteks pelaku kegiatan produksi, kita mengenal pelaku yang dikenal sejak sebelum kemerdekaan sudah dikenal dan diakui keberadaannya seperti perkebunan rakyat, pertanian rakyat, industri rumah tangga dan serangkaian kegiatan lainnya yang dibedakan dari kegiatan badan usaha lain terutama yang berbadan hukum atau berbau pengertian modern/resmi seperti firma, NV DAN CV. Perbedaan perekonomian rakyat dari pelaku kegiatan produksi lain ditentukan oleh skala kegiatannya yang kecil-kecil, cara pengolahannya yang belum menggunakan prinsip perusahaan modern dan teknologi yang digunakan relative tertinggal dibanding perusahaan besar (lebih disesuaikan dengan kesiapan masyarakat sekitar) serta keterikatan tradisi yang kuat dalam pengelolaannya.

Dilihat dari perspektif jumlah unit usaha sudah sangat jelas bahwa corak kegiatan perekonomian Indonesia pada saat memasuki abad baru ini masih didominasi oleh usaha kecil terutama usaha mikro. Dari kaca mata penyerapan tenaga kerja usaha kecil merupakan penampung terbesar yang mencapai sekitar 89 persen, sehingga usaha besar sesuai dengan jumlah unit usahanya hanya menyumbang sekitar 0,51 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Namun jika kita lihat dari komposisi pembentukan nilai tambah usaha besar menguasai sekitar 42 persen, sementara usaha kecil hanya 41 persen sehingga sisanya merupakan kontribusi usaha menengah hanya menguasai sekitar 17 persen. Potret ini selain menggambarkan ketimpangan dalam produktivitas sekaligus juga menggambarkan kerawanan structural serta rendahnya potensi untuk bangkit dan maju tanpa persoalan sosial, karena peran kelas menengah yang lemah. Akibat krisis kelas menengah kita rontok dan belum pulih kembali dan apabila hal ini dibiarkan akan menghambat proses demokratis selanjutnya, padahal kita menginginkan percepatan yang terus menerus untuk mengejar ketertinggalan akibat keterpurukan. Dalam proses perubahan kemajuan antara perkembangan ekonomi, politik dan sosial haruslah saling mengisi dan mengawal perubahan itu sendiri.

Dilihat dari sudut pemilikan atau penguasaan usaha dalam kegiatan produksi barang dan jasa tersebut dapat dikenali empat macam kelompok besar yakni: (1). Perekonomian rakyat, (2). Usaha swasta besar nasional, (3). Usaha Negara, dan (4). Swasta besar asing. Konteks pembagian ini biasanya berkaitan dengan penguasaan aset produktif dan banyaknya unit usaha serta orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga di dalamnya terkandung gambaran kekuatan politik dan kekuatan ekonomi yang jarak antara keduanya dalam pengertian Negara menggambarkan potret keadilan. Demikian juga dari segi ciri dan karakternya akan membedakan fungsi dan tugas masing-masing dalam pencapaian tujuan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat yang berlandaskan pada

keadilan sosial. Oleh karena itu juga dikenal pembedaan fungsi perusahaan swasta sebagai *private sector profit oriented* sementara perusahaan Negara digolongkan sebagai *public sector service oriented*.

Lebih jauh kita perhatikan struktur usaha pada masing-masing sektor kegiatan ekonomi sebenarnya Nampak benar, bahwa sektor tradisional seperti pertanian didominasi oleh usaha berkala kecil/mikro. Sektor terbesar kedua yang menjadi basis kegiatan usaha kecil adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, terutama perdagangan eceran. Namun demikian, BPS pada tahun 2000 mencatat bahwa sebagian terbesar adalah usaha mikro dalam skala yang sangat kecil dan bukan merupakan badan hukum. Urutan ketiga adalah sektor industri pengolahan terutama industri pengolahan makanan dan minuman yang mengolah hasil pertanian dan kerajinan yang berbasis pertanian. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Departemen Pertanian sektor agrobisnis ini menyumbang sekitar 47 persen dari produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kerangka ini sebenarnya terdapat dua kesimpulan bahwa pertama sektor-sektor ekonomi yang didominasi oleh usaha kecil/mikro pada dasarnya adalah sektor tradisional yang sejak lama dikenal sebagai kehidupan kegiatan ekonomi rakyat; dan kedua proses transformasi struktur ekonomi Indonesia terjadi lompatan dari sektor pertanian ke sektor jasa tanpa melewati sektor industri sehingga tidak sempurna dan terjadi karena unsur keterpaksaan yang melahirkan sektor informal di sektor jasa dengan nilai tambah rendah.

Dimensi lain yang penting untuk dipertanyakan adalah penguasaan aset yang timpang antara usaha besar dan usaha kecil dan menengah sebagaimana digambarkan oleh BPS tahun 2001 bahwa 57 persen aset tetap berada di tangan usaha besar, sementara usaha kecil hanya menguasai sekitar 21 persen saja. Padahal dengan penguasaan aset sebesar itu usaha kecil berhasil menyediakan lapangan kerja sekitar 89 persen dari lapangan kerja yang tersedia serta menyumbang sekitar 41 persen PDB. Kenyataan ini semakin mengukuhkan tesis perlunya "redistribusi aset" yang penuh dikembangkan, namun menimbulkan kritik pedas. Padahal baru masuk dalam satu elemen saja, yaitu alokasi kredit untuk sektor tertentu (Pertanian tanaman pangan terutama padi) dan kemudian dihentikan tanpa kepastian, sehingga menyisakan banyak persoalan. Jika kita tanggapi secara dingin redistribusi aset pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara yang *market friendly* dan tidak terkesan hanya sekedar membagi-bagi atau memindahkan dari tangan yang pada saat ini menguasainya.

Dalam kasus penguasaan aset oleh sektor-sektor ekonomi rakyat, maka yang paling rentan adalah status kepemilikan dan penguasaan, para petani pemilik tanah serta merta dipandang sebagai orang miskin oleh sektor modern (terutama perbankan) karena ketiadaan bukti legal akan kepemilikan dan penguasaannya. Resiko pertanian dan perdesaan tidak dapat dihitung karena tiadanya catatan berbagai informasi pendukung yang handal dan layak dipercaya oleh lembaga keuangan, karena pemerintah lalai mengerjakannya. Temuan-temuan lokal yang jenius tidak mendapatkan tempat karena kurang dukungan untuk mengembangkan dan perlindungan akan haknya. Dengan demikian pada dasarnya dalam kerangka redistribusi aset jangka panjang masih tersedia jalan untuk melakukannya yaitu melalui apa yang disebut penciptaan aset masyarakat secara luas atau *broad base asset creation* melalui berbagai kegiatan berbasis ilmu

pengetahuan dan kegiatan investasi murah bernilai tambah tinggi. Hal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki aset-aset Negara yang telah terjual melalui privatisasi dengan berpartisipasi di pasar saham atau penjualan kembali.

Dengan demikian pemahaman bahwa ekonomi rakyat sebagai aktor akan lebih mudah dibanding memahami ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem sesuai kesepakatan politik. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman empiris perjalanan perekonomian bangsa Indonesia di mana mereka hadir dan memberikan kontribusi nyata dalam menyumbang kehidupan bangsa. Sektor-sektor kegiatan ekonomi yang didukung oleh ekonomi rakyat praktis tidak mengalami krisis sebagaimana dapat dilihat dari masing-masing sektor maupun antar daerah. Banyak daerah yang masih mampu menyumbang pertumbuhan dibalik pertumbuhan nasional yang negatip demikian juga jika dilihat dari sektor-sektor seperti pertanian yang masih mampu tumbuh pada tahun 1998 dan 1999 ketika perekonomian kita mengalami pertumbuhan negatip dan nol. Dengan menempatkan ekonomi rakyat sebagai bagian dari sektor-sektor maka pemberdayaan ekonomi rakyat berarti memampukan sektor-sektor ini dalam proses transformasi menuju atas utama perekonomian dengan mulus. Artinya para pelaku kecil tiada yang dimarginalisasikan oleh proses menuju arus utama. Jika itu yang menjadi dasar maka pemberdayaan ekonomi rakyat adalah memampukan mereka dalam proses mekanisme pasar yang semakin tinggi intensitasnya. Dimensi politik dan sosial perlu dipersiapkan sebagai prasyarat untuk mengawalinya.

Sisi lain dari pelaku dalam perekonomian kita adalah para konsumen di mana rumah tangga kita menduduki pangsa terbesar dalam pengeluaran agregat (65%) yang diikuti oleh pengeluaran pemerintah (6%) dan selebihnya adalah pembentukan modal domestic sebesar 25% serta sisa netto dari ekspor-impor-stok. Patut dicatat bahwa perekonomian Indonesia sudah memiliki derajat keterbukaan yang tinggi di mana rasio antara total perdagangan luar negeri yang terdiri dari ekspor dan impor telah mencapai sekitar 55 persen dari PDB. Derajat keterbukaan ini sekaligus menggambarkan kehidupan perekonomian kita yang semakin tidak dapat dilepaskan dengan hubungan dengan sektor luar negeri.

Aspek lain dari rumah tangga yang perlu diperhatikan adalah struktur rumah tangga berdasarkan pengeluaran yang secara garis besar terdapat rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Persoalan kemiskinan adalah fenomena structural yang penyebabnya sangat kompleks dan pemecahannya tidak hanya dapat dilihat dari sisi pengeluaran tetapi juga dari sisi produksi dan penguasaan aset produktif. Tetapi untuk melihat persoalan pengelompokan penduduk miskin ini lazimnya menggunakan pendekatan pengeluaran, baru kemudian didalami dari dimensi penyebabnya. Krisis ekonomi juga dapat terekam dari sisi pengeluaran yang selama krisis telah dilaporkan terjadinya kemerosotan status gizi masyarakat yang melanda rumah tangga miskin sehingga dikhawatirkan akan lahir suatu generasi yang hilang yang akan menjadi beban ekonomi permanen dalam 20 tahun mendatang.

Dalam konteks memahami cita-cita pembangunan ekonomi Indonesia untuk mewujudkan “makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran” dalam suatu

perekonomian pasar, maka perumusan tiga tujuan kebijakan makro ekonomi (pertumbuhan, stabilitas dan kesempatan kerja) yang kemudian diterjemahkan menjadi trilogi pembangunan (pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan) ternyata belum mampu menghindarkan dari proses marjinalisasi yang telah terjadi terhadap sekelompok warga bangsa akibat politik pembangunan yang bias pertumbuhan dan stabilitas yang mengekang. Persoalan yang dihadapi oleh kerangka teori ekonomi ternyata bukan pada kerangka penjelasan dan kemampuan melakukan prediksi, tetapi juga terletak pada pengukuran tentang output. Jika prima kausa utama kemiskinan adalah pengangguran, dan ketidakadilan berpangkal dari banyaknya orang miskin, maka dalam trilogi juga sama pentingnya untuk menempatkan usaha menghilangkan kemiskinan sebagai bagian dari tujuan makro sebagai penajaman dari pemerataan. Standar *texboox* menyebutkan **kesempatan kerja**, sedangkan dalam politik pembangunan lima-tahunan diterjemahkan menjadi **pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya**, maka sebagai penjabaran indikator pencapaiannya adalah **pengurangan angka penduduk miskin**.

DEMOKRASI EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Dalam pembangunan suatu masyarakat yang dualistis dan sedang dalam proses transformasi peran pengembangan kelembagaan menjadi semakin penting. Dalam sistem pasar bagi suatu perekonomian yang maju kelembagaan akan mengikuti pasar (*demand driven*), namun dalam perekonomian subsisten kelembagaan yang dapat menarik perubahan masyarakat (*institutional driven*). Oleh karena itu rentang persoalan kelembagaan ekonomi bagi masyarakat Indonesia menjadi cukup jauh dan variasinya cukup luas. Dalam keadaan demikian tentu tidak akan ada suatu lembaga yang sesuai untuk mengatasi semua persoalan-persoalan kelembagaan di dalam perekonomian yang sedang berkembang pada akhirnya harus dilihat dari titik pandang apakah dalam kerangka keistimewaan secara makro atau sebenarnya sedang memahami keberpihakan untuk mengangkat derajat pelaku ekonomi rakyat dalam konteks kehidupan yang demokratis di mana seharusnya mewakili sebagian besar aspirasi masyarakat.

Dalam menangkap makna demokrasi ekonomi pada dasarnya ingin mengembangkan suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar dan tugas utama agar mekanisme pasar dapat bekerja secara efisien dan sehat perlu dilakukannya pengelolaan yang memungkinkannya. Dengan demikian, dalam menjabarkan makna demokrasi ekonomi pernah dikembangkan konsep pasar terkelola. Peran pemerintah adalah menjaga lapangan permainan yang sama agar terjadi pertukaran yang efisien. Melalui kebijakan fiskal dan moneter pemerintah mengembangkan iklim yang membantu terjadinya kegiatan produksi dengan kapasitas yang terus meningkat. Namun demikian format ini seharusnya dikembangkan kembali ketika tanggung jawab *monetary stability* dan *fiscal sustainability* tidak lagi dalam satu kewenangan yaitu pemerintah saja, tetapi ada unsur Bank Indonesia yang independen. Sehingga dalam format sistem keuangan perbankan setelah UU BI yang baru (UU 23/1999) kedua-duanya diawasi oleh satu lembaga politik yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Format baru ini memperjelas kaitan antara kebijakan ekonomi dan keputusan politik yang berada di tangan pemerintah perbankan dan DPR. Dalam suatu perekonomian pasar, peran Negara melalui pemerintah yang dipilih secara demokratis akan mewujudkan keinginan rakyat pemberi mandat dalam produk-produk

yang nyata. Peran pemerintah dimaksud paling tidak ada empat macam menyediakan kerangka pengaturan (*regulatory framework*), penyediaan informasi, penyangga atau andil dalam menanggung resiko (*bearing and sharing risk*) dan penyediaan fasilitas/barang publik (*production of public goods*). Pengaturan pada dasarnya dilakukan dengan menetapkan seperangkat peraturan dan syarat-syarat yang memungkinkan perdagangan dan pertukaran dapat syarat yang memungkinkan perdagangan dan pertukaran dapat berjalan. Termasuk di dalamnya adanya jaminan dan aturan tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Sehingga Negara pada dasarnya menyediakan peraturan yang memadai dan menyediakan lembaga peradilan yang melayani berbagai penyelesaian gugatan. Dengan demikian antara hak dan kewajiban dijamin dengan terselenggaranya sistem peradilan yang adil. Disisi lain persoalan yang terkait dengan penyediaan informasi menjadi penting dalam suasana terjadi informasi yang bersifat asimetri.

Aspek ketiga yang penting dalam Negara adalah dukungan untuk kegiatan yang bersifat pengembangan, sehingga hal ini juga sering dikaitkan dengan kehadiran perusahaan milik Negara yang dikenal sebagai BUMN. Kehadiran perusahaan milik negara telah merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional kita, karena kita mengakui kehadirannya. Namun demikian karena pertimbangan efisiensi tidak jarang kehadiran BUMN sering dianggap menjadi beban perekonomian dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat bagi pelaku yang lain. Di Indonesia sejak krisis ekonomi proses privatisasi masih terus berlangsung, meskipun rencana privatisasi ini sudah sejak sebelum krisis dirancang untuk meningkatkan efisiensi, namun akhir-akhir ini berubah menjadi penjualan secara keseluruhannya. Masih dalam kaitannya dengan tugas negara dalam menghasilkan barang dan jasa maka lazimnya argument penting untuk kehadiran negara dikaitkan dengan penyediaan barang publik. Dalam proses pengembangan jasa publik ini menjadi elemen penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pengembangan karena biaya operasional dapat ditekan oleh pelaku perorangan.

Dalam demokrasi ekonomi pada format sistem perundang-undangan bidang perekonomian yang sekarang ada, maka keberpihakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan perdesaan selain melalui mekanisme pengaturan juga harus didukung melalui mekanisme anggaran baik pada tingkat nasional, propinsi maupun daerah. Tanpa dukungan anggaran yang jelas maka pemberdayaan sepenuhnya hanya tergantung pada pasar atau berarti tiada keberpihakan. Dengan demikian dalam format baru ini akan terjadi transparansi sehingga munculnya *free rider* dalam memanfaatkan dukungan pemerintah secara tersembunyi lewat kredit perbankan dapat ditekan. Namun demikian dalam proses peralihan yang semacam ini memerlukan pengembangan yang terus menerus, karena baik secara kelembagaan maupun orientasi pengembangan dinilai belum benar-benar siap. Demokrasi ekonomi memberikan jalan untuk mengatur pemihakan yang diputuskan secara kolektif dan demokratis melalui keputusan politik lembaga legislatif, sementara eksekutif dapat menjalankan amanat keberpihakan dalam bentuk kebijakan penciptaan iklim yang kondusif dan politik anggaran kepada pemberdayaan ekonomi rakyat dan perdesaan sebagai stakeholder terbesar.

Keperluan Mendasar: Pemberdayaan Pertanian Dan Perdesaan

Dalam era transisi demokratisasi saat ini, secara nasional tampak ada keinginan sangat kuat untuk mengangkat derajat kesejahteraan petani yang selama ini merupakan bagian terbesar masyarakat yang “tertinggal” dalam pembangunan. Tekad tersebut paling tidak terlihat dari *jargon-jargon* umum para calon pemimpin negara masa depan dalam kampanye pemilihan presiden di bulan Juni 2004 ini. Jika benar bahwa jargon-jargon tersebut akan menjadi landasan kebijakan pemerintahan masa depan ini, maka hal itu berarti akan menempatkan pembangunan nasional dalam *mainstream* pembangunan pertanian, dengan petani sebagai subyek utamanya. Hal ini mengingat besarnya potensi sumberdaya (*resource endowment*) dan besarnya masyarakat Indonesia yang bergantung pada bidang pertanian dalam arti luas. Ke depan, pertanian berwawasan agribisnis mestinya diletakkan pada posisi sentral di dalam pembangunan ekonomi, pertanian dan perdesaan. Menggarisbawahi hal itu, para ekonom pertanianpun pada akhir bulan Mei 2004 yang lalu telah mengingatkan para calon pemimpin nasional dalam konklusi konferensi nasionalnya.

Peringatan dari para ekonom pertanian tersebut menjadi amat sangat penting bagi keseluruhan bangsa ini, terutama bagi para pemimpin pengelola negara mendatang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mengapa demikian? Indonesia sebagaimana negara-negara agraris berkembang lain, bagian terbesar potensinya adalah sumberdaya pertanian dengan bahagian terbesar penduduknya para petani, akan tetapi sejauh ini justru belum menunjukkan peningkatan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Banyak bukti menunjukkan kecendrungan itu. Secara makro misalnya, ketidak serasian karena tajamnya penurunan *Gross Domestic product* pertanian (dari sekitar 80% GDP nasional di tahun 1950-an menjadi hanya 17% di awal milenium ini) dibanding lambatnya penurunan *share* ketenagakerjaannya (dari sekitar 90% di tahun 1950-an menjadi 46% di awal milenium ini) menunjukkan betapa rendahnya produktivitasnya. Globalisasi tampaknya juga tidak berpihak pada pertanian, dengan terjadinya kecendrungan konsisten penurunan harga-harga riil produk primer pertanian tersebut secara agregat tentu akan menyulitkan posisi petani dan pertanian masa depan. Petani sebagai *the real investors* seringkali tidak menjadi perhatian dan bahkan diabaikan oleh pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan tampaknya masih *friendly* dengan para pengusaha besar dan sektor di luar pertanian. Misalnya, tahun 2003 lalu Bank Indonesia mencatat bahwa jumlah kredit investasi sektor pertanian Rp 10,3 triliun dari total Rp 54,6 atau sekitar 6,53 persen. Sektor pertanian tidak hanya memerlukan tingkat suku bunga yang tepat, tetapi juga akses dan kemudahan lain yang dapat dimengerti oleh pelaku sektor Pertanian. Dalam pada itu, secara mikro wilayah banyak implementasi pembangunan pertanian yang masih menjadi keprihatinan, misalnya semakin terbatasnya penguasaan dan skala usaha akibat konversi terus menerus lahan produktif pertanian kebukan pertanian teknologi yang relative stagnan dan “miskin” terbosan baru, serta kecendrungan keterpisahan (*decoupling*) pertanian antar skala dan wilayah, baik horizontal maupun vertikal.

Mencermati keadaan di atas, tulisan sederhana ini ingin mengajukan pemikiran atau konsepsi dasar bagi pembangunan pertanian masa depan, terutama dikaitkan dengan upaya kelembagaan (*institutional building*). Upaya kelembagaan tersebut menjadi sangat

penting terutama dalam rangka mengakselerasi modal sosial bagi kebutuhan pembangunan ekonomi pertanian yang berdaya saing, lebih demokratis, berkerakyatan, sehingga diharapkan lebih mensejahterakan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Mudah-mudahan, pengelola negara masa depan pasca pemilu 2004 ini mengkontemplasikannya menjadi landasan kebijakan pembangunan ekonomi nasional mendatang, dan merealisasikannya di lapangan.

Mendalami potret pembangunan pertanian berwawasan agribisnis saat ini, secara nasional masih sungguh-sungguh memprihatinkan. Agribisnis yang sejak tahun 80-an secara nasional telah diposisikan sebagai *a new way to look agriculture, a new agriculture paradigm*, ternyata pada tingkatan konsepsional saja masih banyak menyimpan berbagai kesalahan pengertian dan pemahaman bagi sementara pihak, sehingga implementasinya pun menjadi jauh dari hakikat tujuan pengembangan agribisnis itu sendiri. Sebagai *buzz word*, *agribisnis* memang telah sangat populer. Terminologinya telah ‘membudaya’ sejak pucuk pimpinan negara, berbagai pertemuan ilmiah dan seminar, dokumen-dokumen pemerintahan hingga ke tingkat penyuluh dan bahkan masyarakat umum. Akan tetapi, implementasi konsepsi agribisnis tersebut ternyata tidak sejalan dengan popularitas istilahnya.

Sebagai suatu paradigma berfikir baru, agribisnis pada dasarnya menekankan pada cara pandang yang melepaskan diri dari sebuah “tradisi” konvensional yang selama ini dianut, ketika membicarakan pertanian. Pertanian tidak hanya dipandang sebagai suatu sistem kegiatan *on-farm* semata-mata, akan tetapi mencakup berbagai subsistem dalam keseluruhan sistem, yang disebut agribisnis. Bagi Indonesia khususnya, agribisnis bukanlah sekedar bertujuan untuk membuat kegiatan pertanian menjadi berdaya saing saja (sehingga mampu berkompetisi dalam arena global), akan tetapi lebih penting dari itu harus mampu membuat petani lebih produktif dan sejahtera. Oleh karena itu, membangun pertanian berdasarkan pendekatan agribisnis selain memperhitungkan ‘nilai pertukaran’ (*exchange value*) sebagai parameter, harus menginternalisasikan nilai-nilai lain yang sebenarnya melekat (*inherent*), yaitu *instrumentals values (value added values)* dan *intrinsic value (existence value)*. Dengan demikian dalam subyek pembangunan dimana aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi bagian daripadanya, maka nilai-nilai pada setiap kegiatan pertanian dengan pendekatan sistem agribisnis tidak perlu diperhitungkan di bawah nilai sebenarnya (*under value*), sebagaimana yang terjadi selama ini dalam harga-harga produk pertanian.

Oleh karena itu, strategi besar dalam membangun pertanian masa depan seharusnya tidak cukup hanya diletakkan dalam kerangka agribisnis yang sempit, akan tetapi harus mengembangkan pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan dan berkeadilan. Mengapa demikian?. Melalui pendekatan pembangunan pertanian seperti itu, nilai-nilai *intrinsic* dan *existence* akan dipertimbangkan dan bahkan diinternalisasikan sebagai bagian dari parameter dalam setiap strategi pembangunan pertanian yang dilakukan. Dengan cara berpikir inilah, harga (*value*) setiap kegiatan pertanian akan diperhitungkan secara “adil” karena pada hakekatnya “harga” (*price*) adalah bersifat *public goods*, dan oleh karenanya menjadi kewajiban pemerintah untuk senantiasa “menjaga” parameter

dan dinamika harga-harga tersebut dalam koridor yang “benar” dan berkeadilan bagi masyarakat banyak.

Namun demikian, pada tataran konseptual saja, saat ini kita masih banyak menghadapi atau menjumpai kesalah-pengertian tentang apa yang dimaksud dengan agribisnis tersebut. Beberapa kesalahan-pengertian tersebut antara lain:

- Agribisnis diartikan sebagai suatu kegiatan pertanian komersial, atau petani yang berbisnis atau sekedar berorientasi pasar. Pengertian tersebut menghilangkan makna “sistem” dan keterkaitan antar subsistem, yang menjadi “sukma” bagi wawasan agribisnis itu sendiri;
- Agribisnis hanya diartikan sebagai perusahaan-perusahaan besar dibidang pertanian, sehingga mempersempit pengertian dan lingkup kesistemannya;
- Agribisnis hanya dipandang sebagai suatu “program” bagi kementerian pertanian, sehingga menghilangkan esensinya sebagai *a new paradigm*.
- Agribisnis diartikan sebagai sektor yang berkonotasi sempit, dan lainnya.

Kesalah-pengertian makna tersebut tampaknya telah menjadi salah satu sebab “bias”nya sementara pihak dalam mendalami dan mencermati secara benar problema pertanian. Masalah pertama, utama dan mendasar yang dihadapi bangsa dalam pertanian adalah semakin buram dan memperhatikannya potret kehidupan para petani. Struktur petani dan pelaku pertanian secara nasional sangat beragam, demikian pula dengan bidang kegiatannya. Bagian terbesar petani di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan dalam karakteristik petani “*gurem*” baik buruh tani maupun yang subsisten tradisional (*peasant*) dan masih semi komersial (*pseudo farmer*), selain sebagian kecil lain merupakan petani berkarakteristik komersial dan perusahaan pertanian atau perusahaan agribisnis baik dalam level nasional maupun *multi national corporation*.

Sekitar sepuluh tahun lalu, Badan Pusat Statistik mencatat ada sekitar 34.65 juta usaha mikro (98.1 persen dari total), usaha kecil (1.3persen) menengah dan besar (0.6 persen), dengan total tenaga mencapai 67 juta orang. Pada tahun 2001, sebesar 57 persen aset dikuasai usaha besar, dan hanya 21 persen saja yang dikuasai usaha kecil, yang justru mampu menyediakan lapangan kerja sekitar 89 persen, dan menyumbang sekitar 41 persen GDP. Bila dilihat dari bidang pembangunannya, usaha mikro dan kecil di bidang pertanian mempunyai kontribusi terbesar, yaitu 57, persen industri 7, persen serta perdagangan dan jasa sebesar 36 persen. Saat ini secara garis besar struktur tersebut tidak banyak berubah. Gambaran tersebut menjelaskan bahwa pola agribisnis kita masih sangat didominasi dan ditopang dari usaha pertanian rakyat yang berskala kecil (“*gurem*”) dengan tenaga kerja yang relatif “kurang trampil” dan tersebar di berbagai wilayah tanpa ikatan skala. Sebagaimana telah diungkapkan, kegiatan usaha tersebut seringkali masih belum sepenuhnya berorientasi pasar-komersial dan bahkan sebagian masih cenderung subsisten-tradisional, tentu dengan keragaman penggunaan teknologi yang sangat tinggi.

Dualistic problem dalam kegiatan pertanian sebagaimana dipreposisi Boeke tetap menjadi masalah penting bagi pembangunan pertanian. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang sangat kritis untuk meluruskan atau menjernihkan kesalahan pengertian tersebut, jika tidak ingin dijumpai potret masa depan petani dan pertanian yang semakin memperlihatkan pada bangsa ini ke depan. Bagian besar pelaku pertanian membutuhkan hakekat kebijakan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sebagian kecil lainnya, yang justru “menguasai berbagai sumberdaya produktif yang dibutuhkan bagi suatu pembangunan pertanian kita diyakini tidak akan mampu mengatasi masalah dasar dan structural dalam pertanian. Misi inilah sebenarnya yang menjadi landasan dari agribisnis sebagai suatu paradigma baru dalam pembangunan pertanian kita.

Jika disepakati bahwa agribisnis sebagaimana diuraikan di atas adalah cara pandang baru (*a new paradigm*) bagi bangsa ini dalam membangun dan mengembangkan pertanian sesuai dengan hakekat tujuan dasarnya (baca: meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani) dengan memperhatikan potret petani dan pertanian di Indonesia yang sangat dualistik saat ini, maka hal pertama dan utama yang secara teoritis dibutuhkan adalah **upaya kelembagaan** (*institutional building*) yang akan memungkinkan dan memberikan landasan kondusif (*enabling*) bagi berkembangnya kehidupan petani dan pertanian masa depan. Upaya kelembagaan tersebut harus dipandang sebagai suatu prasyarat keharusan (*necessary condition*) bagi suatu rekonstruksi dan restrukturisasi ekonomi (pertanian) secara menyeluruh.

Berkembangnya prasyarat keharusan tersebut pada dasarnya merupakan tugas utama pemerintah dalam mewujudkan keberpihakannya melindungi” dan “memberdayakan” petani dan pertanian. Tanpa prasyarat keharusan tersebut, diyakini tidak mampu menjadi *trigger* pemberdayaan petani dan membuka ekonomi perdesaan. Segala bentuk upaya manajemen untuk membangun kehidupan petani dan pertanian yang dilaksanakan tanpa menyentuh atau mengkonstruksi ulang kelembagaan pertanian yang ada, diyakini tidak substansial sehingga tidak akan mampu mengatasi hakekat problema yang sedang dihadapi pertanian bangsa ini. Sayangnya, upaya-upaya kelembagaan yang dilakukan selama ini kurang tercermin sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan pertanian, sehingga posisi ekonomi petani tetap menempati stratum terbawah dalam konstelasi struktur ekonomi Indonesia saat ini, dan bahkan sedang konstelasi struktur ekonomi Indonesia, saat ini dan bahkan sedang mengalami involusi yang mengkhawatirkan. Dibutuhkan kehadiran suatu kebijakan sosial ekonomi yang mendasar dan komprehensif dalam pembangunan agribisnis, sebagai bagian dari proses pemberdayaan ekonomi petani.

Upaya kelembagaan sebagai prasyarat keharusan dalam membangun pertanian (agribisnis) berdaya saing dan berkeadilan diharapkan dapat menjadi “kunci pembuka”. Akan tetapi, “kunci pembuka” inipun diyakini tidak akan cukup tanpa adanya upaya-upaya manajemen dalam mengembangkan agribisnis sesuai lingkungan internal maupun eksternalnya. Harus ada semacam prasyarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa upaya manajemen (*management building*). Dinamika dan keragaman yang tinggi dalam karakteristik lingkungan produksi agribisnis tentu tentu memerlukan antisipasi yang tinggi pula dalam mengeliminasi dampak-dampak yang tidak dikehendaki. Hal yang

sama terjadi dalam aspek sosial budaya yang juga terus mengalami perubahan, terutama dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi (misalnya dari rumah tangga ke *food service industry*, berkembangnya *grazing food* dan *stred food* serta pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran yang sedang dan akan merubah cara-cara konsumen dalam mengevaluasi suatu produk).

Jelas karakteristik dan kecendrungan perkembangan karakteristik agribisnis mempunyai implikasi penting dalam manajemen agribisnis. Oleh karena itu, meningkatkan kontribusi agribisnis dalam suatu konstruksi perekonomian secara keseluruhan adalah sama dengan membangun manajemen agribisnis pada berbagai kondisi yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah, karakteristik proses produksi dan produk agribisnis yang berbasis pada proses biologis mengisyaratkan bahwa perusahaan agribisnis haruslah terintegrasi secara vertical. Hal ini member arti bahwa subsistem agribisnis hulu, budidaya dan subsistem hilirnya diharapkan berada pada satu sistem manajemen yang integrative secara vertical. Tuntutan integrasi vertical ini pada dasarnya dilandasi oleh argument teknis maupun argument finansial/ekonomi.

Berdasarkan argument teknis, antara kaitan sektor hulu-hilir memiliki ketergantungan teknis yang sangat tinggi sesuai karakteristik produk biologis. Untuk menghasilkan produk bawang merah dengan residu pestisida rendah misalnya, tidak mungkin dicapai bila hanya mengandalkan kegiatan produksi pada sektor hilir saja, tapi harus didukung oleh teknologi budidaya dengan penggunaan pestisida seminimum mungkin (pada sektor budidaya). Teknologi budidaya seperti itu hanya mungkin dilakukan bila bibit bawang merah yang dihasilkan pada sektor hulu adalah bibit yang tahan penyakit dan produktivitas hasilnya tinggi (misalnya teknologi bibit *transgenic*). Contoh ini menunjukkan perlunya konsistensi produk (jumlah, jenis, mutu, kontinuitas) yang hanya mungkin dicapai bila sektor hulu, budidaya dan hilir dalam agribisnis dikelola dalam suatu manajemen yang integrative.

Dari segi ekonomi, tuntutan pengelolaan/pengusahaan integrasivertikal agribisnis pada dasarnya untuk menghilangkan (meminimumkan) ketimpangan margin pada berbagai sektor hulu, budidaya dan hilirnya. Keadaan buruk inilah yang seringkali terjadi pada kegiatan agribisnis saat ini. Agribisnis yang dikelola tidak secara integratif (tersekat-sekat, sendiri-diri) member dampak masalah ketimpangan marjin, dan biasanya sektor budidaya menjadi korban karena struktur ekonomi yang dualistic. Informasi pasar (sebagai akibat perubahan selera, konsumen, harga) tidak ditransmigrasian secara “adil” kepada sektor hilir, budidaya dan hulunya, bahkan cenderung ditahan untuk memperkuat posisi monopsonitis pada sektor hulunya. Selain itu, manajemen agribisnis yang tidak integrative akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi pada sektor agribisnis, lebih-lebih dalam struktur ekonomi yang dualistik (sektor budidaya dengan petani dan UMKM, sektor hulu dan hilir dengan industri besar).

Manajemen agribisnis integrasi vertical juga memungkinkan agribisnis untuk meningkatkan penetrasi pasar (*market penetration*) mengembangkan pasar (*market development*) maupun pengembangan produk (*product development*) melalui strategi-strategi pemasaran 4p (*price, product, place, promotion*) melalui *agri supply chain*. Diramalkan bahwa perkembangan pasar modern, utamanya *supermarket* dan *hypermarket* akan dengan segera mengambil alih peranan pasar tradisional. Hal ini telah terjadi di beberapa negara lain, seperti negara-negara Amerika latin, Asia ,dan Afrika. Oleh karenanya, ketidak kemampuan petani kita untuk beradaptasi dan terkait dengan *supply chain* pasar modern, akan menyebabkan masuknya produk pertanian dan malah mungkin produsen/petani dari luar negeri.

Karakteristik konsumen produk agribisnis yang sangat dipengaruhi oleh aspek sosial budaya dan segala keragamannya, memerlukan diferensiasi 4p untuk peningkatan pangsa pasar. Dengan perkataan lain, dengan manajemen integrasi vertical memungkinkan perusahaan agribisnis untuk lentur dalam volume, mutu produk, *delivery*, dan lain-lain untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi. Inilah tantangan manajemen sekaligus “tekanan” bagi petani dan pertanian kita menyongsong masa depannya.

INSTITUTIONAL BUILDING:UPAYA MEMBERDAYAKAN PERTANIAN DAN EKONOMI PERDESAAN

Upaya mewujudkan pembangunan pertanian (*agribisnis*) masa mendatang adalah sejauh mungkin mengatasi masalah dan kendala kritical yang sampai sejauh ini belum mampu diselesaikan secara tuntas sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius. Satu hal yang sangat kritis adalah bahwa meningkatnya produksi pertanian (agribisnis) selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan. Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu (*integrated farming system*). Oleh karena itu persoalan membangun kelembagaan (*institution*) di bidang pertanian dalam pengertian yang luas menjadi semakin penting agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut *on farm business* saja, akan tetapi juga terkait erat dengan aspek-aspek *off farm agribusinessnya*.

Jika ditelaah, walaupun telah melampui masa-masa kritis krisis ekonomi nasional, saat ini sedikitnya kita masih melihat beberapa kondisi yang dihadapi petani di dalam mengembangkan kegiatan usaha produktifnya, yaitu:

- Akses yang semakin kurang baik terhadap sumberdaya (*access to resources*), seperti keterbatasan aset lahan, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan produktif lainnya;
- Produktivitas dan tenaga kerja yang relative rendah (*productive and remunerative employment*), sebagai akibat keterbatasan investasi, teknologi, keterampilan dan pengelolaan sumberdaya yang efisien;

- Perasaan ketidak merataan dan ketidakadilan akses pelayanan (*access to services*) sebagai akibat kurang terperhatikannya rangsangan bagi tumbuhnya lembaga-lembaga sosial (*social capital*) dari bawah;
- Kurangnya rasa percaya diri (*self reliances*), akibat kondisi yang dihadapi dalam menciptakan rasa akan keamanan pangan, pasar, harga dan lingkungan.

Secara klasik sering diungkapkan bahwa penyebab utama ketimpang pendapatan dalam pertanian adalah ketimpangan pemilikan tanah. Hal ini adalah benar, karena tanah tidak hanya dihubungkan dengan produksi, tetapi juga mempunyai hubungan yang erat dengan kelembagaan, seperti bentuk dan birokrasi dan sumber-sumber bantuan teknis, juga pemilikan tanah mempunyai hubungan dengan kekuasaan baik di tingkat lokal maupun di tingkat yang lebih tinggi. Manfaat dari program-program pembangunan pertanian di perdesaan yang datang dari “atas” tampaknya hanya jatuh pada kelompok pemilik tanah, sebagai lapisan atas dari masyarakat desa. Sebagai contoh, program kredit dengan jaminan tanah serta bunga modal, subsidi paket teknologi, teknologi produksi, bahkan control terhadap distribusi pengairan dan pasar local juga dilakukan oleh kelompok ini. Dilain pihak, pelaksanaan perubahan seperti *landreform*, *credit reform* dan sebagainya yang memang secara substansial diperlukan sebagai suatu cara redistribusi asset masih merupakan isu yang kurang populer. Berbagai langkah terobosan sebagai suatu upaya kelembagaan guna memecahkan permasalahan di atas yang dikembangkan seperti pengembangan sistem usahatani sehamparan, pola PIR dan sebagainya, sama sekali belum memecahkan problem substansial yang oleh Boeke diungkapkan sebagai “dualisme”.

Dalam pada itu, karakteristik perdesaan seringkali ditandai dengan pengangguran, produktivitas dan pendapatan rendah, kurangnya fasilitas dan kemiskinan. Masalah-masalah pengangguran, setengah pengangguran dan pengangguran terselubung menjadi gambaran umum dari perekonomian saat ini. Pada waktu yang sama, terjadi pula produktifitas yang rendah dan kurangnya fasilitas pelayanan penunjang. Rendahnya produktifitas merupakan ciri khas di kawasan perdesaan. Pada umumnya, sebagian besar petani dan para pengelola industri perdesaan, bekerja dengan teknologi yang tidak berubah. Investasi modal pada masa sebelum krisis lebih banyak diarahkan pada industri perkotaan daripada di sektor pertanian perdesaan. Sebagai konsekuensinya, perbedaan produktifitas antara petani perdesaan dengan pekerja industri perkotaan semakin besar senjangnya. Hal ini merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam menyoroti ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, pertanian dan bukan pertanian.

Pelayanan publik bagi adaptasi teknologi dan informasi terutama untuk petani pada kenyataannya sering menunjukkan suasana yang mencemaskan. Di satu pihak memang terdapat kenaikan produksi, tetapi di lain pihak tidak dapat dihindarkan terjadinya pencemaran lingkungan, terlemparnya tenaga kerja ke luar sektor pertanian yang tidak tertampung dan tanpa keahlian/ketrampilan lain, ledakan hama karena terganggunya keseimbangan lingkungan dan sebagainya. Manfaat teknologipun seringkali masih dirasakan lebih banyak dinikmati pemilik aset sumberdaya (tanah) sehingga pada gilirannya justru menjadi penyebab utama dalam mempertajam perbedaan pendapatan

dan mempercepat polarisasi dalam berbagai bentuk. Perasaan ketidak-amanan dan kurang-adilan akibat berbagai kebijakan dan kebocoran (misalnya kasus impor *illegal, damping*, pemalsuan dan ketiadaan saprotan, keracunan lingkungan, jatuhnya harga saat panen dan lainnya) seringkali menjadi pelengkap rasa tidak percaya diri (dan apatisme berlebihan) pada sebagian petani.

Tinjauan holistik dengan memperhatikan kondisi berbagai aspek kehidupan pertanian dan perdesaan seperti diuraikan disini, menunjukkan bahwa inti esensi dari proses pembangunan pertanian dan perdesaan adalah transformasi structural masyarakat perdesaan dari kondisi perdesaan agraris tradisional menjadi perdesaan berbasis ekologi pertanian dengan perusahaan bersistem agribisnis, yang menjadi inti dari struktur ekonomi perdesaan yang terkait erat dengan sistem industri, sistem perdagangan dan sistem jasa nasional dan global.

Mencermati situasi di atas, jelas sangat diperlukan upaya-upaya pengembangan agribisnis yang lekat dengan peningkatan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat agribisnis terutama skala mikro dan kecil dalam suatu kebijakan yang “berpihak”. Keberpihakan kebijakan semacam itu sangat (baca: mutlak) diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan pengembangan agribisnis yang berorientasi ekonomi kerakyatan keadilan, dan sekaligus meningkatkan daya saing dalam iklim “kebersamaan” pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Untuk itu, sebagai prasyarat keharusan diperlukan suatu iklim kebijakan yang mendorong terbangunnya institusi (kelembagaan) yang mampu meningkatkan posisi petani menjadi bagian dari suatu kebersamaan entitas bisnis, baik dalam bentuk kelompok usaha bersama, koperasi, korporasi (*community corporate*) ataupun *shareholder*. Upaya kelembagaan tersebut diyakini akan dapat menjadi nilai (*value*) baru, semangat baru bagi petani untuk terutama dapat melonggarkan keterbatasan-keterbatasannya, seperti akses terhadap sumberdaya produktif (terutama lahan), peningkatan produktivitas kerja, akses terhadap pelayanan dan rasa keadilan, serta meningkatkan rasa percaya diri akan lingkungan yang aman, adil dan transparan.

Manifestasi dan implementasi dari upaya kelembagaan tersebut pada dasarnya bukanlah mudah dan sederhana. Sebagai suatu *rules* atau nilai dan semangat baru dalam pembangunan pertanian ke, depan seyogyanya mengandung berbagai ciri pokok dan mendasar. Pertama, upaya kelembagaan tersebut diharapkan menjadi pendorong terciptanya *the same level playing field* bagi petani dan pelaku ekonomi lainnya, berdasarkan “aturan main” yang *fair, transparent*, demokratis dan adil. Kedua, upaya kelembagaan tersebut mampu mendorong peningkatan basis sumberdaya, produktivitas, efisiensi dan kelestarian bagi kegiatan-kegiatan produktif pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

IV

Reposisi Kelembagaan Ekonomi dalam Restrukturisasi Pertanian dan Perdesaan

REPOSISI PERAN KOPERASI SEBAGAI INSTRUMEN KELEMBAGAAN EKONOMI PERDESAAN

Koperasi dari sejak kelahirannya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu antara *selhelp cooperation* atau *individualitet-solidaritet* (M.Hatta) selalu disebut bersamaan untuk menggambarkan dasar pendirian koperasi. Dengan cara pandang ini koperasi sering dilihat sebagai kerjasama pasar dari sebagian pelaku ekonomi dalam melawan ketidakadilan pasar yang terjadi. Sementara kerjasama yang melibatkan lebih dari satu orang yang menempatkan kebersamaan sebagai dasarnya maka tidak dapat terlepas dari dimensi sosial. Oleh karena itu koperasi juga sering ditempatkan sebagai bentuk *member base economic organization* *fiz a fiz capital base economic organization*. Gambaran inilah yang menjadikan koperasi selalu menjadi pilihan untuk mengatur ekonomi orang yang banyak yang lemah dalam menghadapi persaingan pasar. Namun karena sejarah pengenalan koperasi yang berbeda maka pemikiran koperasipun juga berkembang dengan madzab yang berbeda-beda bahkan kaitan antara dimensi ekonomi murni dengan masalah politik dan sosial banyak campur aduk, terutama di negara sedang berkembang.

Hingga tahun 1961 praktis kita belum pernah menemukan definisi koperasi yang didokumen-tasikan secara formal dan diakui oleh dunia internasional, meskipun koperasi telah hadir sejak abad 18. Koperasi diberikan pengertian yang diterima internasional pada awalnya oleh organisasi bukan milik gerakan koperasi, tetapi justru oleh lembaga internasional yang menangani masalah perburuhan yakni ILO. ILO lebih menekankan pada peran koperasi sebagai instrument untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja, oleh karena itu yang menonjol adalah persyaratan seseorang untuk menjadi anggota koperasi, sehingga lebih ditekankan pada kemampuan untuk memanfaatkan jasa koperasi. Pada tahun 1990an ditengah arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, koperasi dunia juga mempertanyakan kelangsungannya ditengah arus swastanisasi dan persaingannya yang semakin tajam sebagaimana terlihat dalam kongres Tokyo 1992. Namun pada tahun 1995 gerakan koperasi dunia melalui kongresnya di Manchester Inggris menjawab dengan dua tema pokok kembali kepada nilai dan jatidiri koperasi dan menempatkan koperasi sebagai badan usaha atau perusahaan (*enterprise*) dengan pengelolaan demokratis dan pengawasan bersama atas keanggotaannya yang terbuka dan sukarela Gerakan koperasi kembali menyatakan keharusan bagi koperasi untuk menjunjung tinggi nilai etika (*ethical values*) yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepudian kepada pihak lain (*honesty, openness, social responsibility and caring for*

others). Sejak itu gerakan koperasi dunia memiliki definisi secara formal dan tertulis untuk menjadi kesepakatan gerakan koperasi dunia.

Di kawasan Asia Pasifik sejak 1990 telah terjadi interaksi yang baik antara gerakan koperasi dan pemerintah melalui pertemuan dua tahunan. Dalam menanggapi dinamika kawasan yang sedang terjadi telah menetapkan beberapa prinsip sebagai dasar untuk membangun tindakan bersama yaitu:

- Koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi secara benar berjalan sesuai jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diawasi anggotanya, dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi (otonom dan independen).
- Potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan.
- Koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakui keberadaan mereka dan apa yang dapat mereka perbuat.
- Koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lain bila terjadi lapangan permainan yang sama (*fair flaying field*).
- Pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka (*self regulation*).
- Koperasi adalah milik anggota dimana saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan jati dirinya, dan
- Bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila kemitraan ini menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.

Ketujuh sikap ini akan mendasari desakan gerakan koperasi terhadap anggotanya dan pemerintah di negara masing-masing, sehingga dapat kita pandang sebagai gerakan pola salju yang akan dilakukan oleh masyarakat koperasi dunia.

Potret koperasi Indonesia setelah lima puluh lima tahun berkembang dalam suasana demokrasi terpimpin dan sentralisasi kekuasaan serta politik masa mengambang ternyata tetap hadir di dalam perekonomian kita. Potret koperasi program meskipun mencatat keberhasilan bagi pelaksanaan program pemerintah (Swasembada beras maupun pembangunan pertanian dalam arti luas dan pemeliharaan stabilitas ekonomi), namun menimbulkan antipasti masyarakat. Namun gambaran tersebut ternyata hanya menyentuh sekitar 20 persen dari jumlah koperasi yang ada (12.000 koperasi/KUD dari 52.000

koperasi keseluruhan) dan hanya menimbulkan pengaruh pada kurang dari 45 persen pembentukan aset koperasi. Sehingga apabila kita jujur masih terlalu besar kenyataan swadaya koperasi dan manfaatnya bagi mendorong roda perekonomian. Koperasi kredit (kredit, simpan pinjam dan kegiatan pembiayaan oleh koperasi) menguasai 55 persen dari aset koperasi melayani hampir 11 juta nasabah serta menempati tempat ke dua dalam pasar kredit mikro setelah BRI Unit Desa. Sehingga koperasi kredit telah menjadi jaringan terluas dan paling dekat dengan kegiatan ekonomi lapis bawah yang menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi rakyat. Sektor kegiatan ini praktis tidak menjadi perhatian pemerintah, meskipun berbagai upaya telah dirintis oleh program negara donor.

Dengan melihat pengalaman dari berbagai negara dan refleksi pengalaman Indonesia yang sarat dengan intervensi selama lima puluh tahun dan represi sedemikian lama masih menyisakan karakter kemandirian pada sebagian besar masyarakat koperasi, maka koperasi tetap dapat menjadi instrument bagi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi ketidakadilan pasar sepanjang orang diluar koperasi tidak menetapkan persyaratan koperasi dan mencampuri mekanisme koperasi. Adalah tidak adil jika kita mengadili koperasi Indonesia dengan ejekan, padahal kebiasaan yang dikonotasikan tidak baik itu hanya melanda sebagian kecil koperasi yang terkait dengan program dari luar koperasi dan koperasi tidak berdaya menolaknya. Gugatan ketidakadilan ini selayaknya dialamatkan kepada semua pihak selain pemerintah, para ilmuwan, kaum politisi dan media serta gerakan koperasi sendiri yang perhatiannya bias kepada koperasi program. Sehingga pengamatan yang seimbang terhadap gerakan koperasi menjadi terpinggirkan. Untuk dampak tersebut kita patut angkat jempol bahwa dari hari ke hari masih semakin banyak orang yang ingin membangun koperasi secara benar dan menjadi baik, inilah salah satu kekuatan koperasi sebagai perusahaan yang didirikan *one for last*.

Negara mengatur dalam rangka menjaga aturan main yang jelas dan memberikan perlindungan publik terhadap masyarakat baik yang berkoperasi maupun yang berada diluar koperasi. Dengan demikian peran pengaturan dijaga tidak menjadi intervensi yang menimbulkan ketergantungan. Dibanyak negara para pendukung gerakan koperasi selalu menempatkan prinsip: kerja keras dan berusaha dengan keras, jika gagal datang ke pemerintah, jika pemerintah tidak mampu bekerjasama lah dalam koperasi dan bersama koperasi lain (CCA). Semangat ini masih mungkin ditanamkan kembali dan ketergantungan dapat dihindari apabila ada “institusi perantara” yang merupakan representasi kepentingan koperasi dan pemerintah serta *stakeholder* lainnya. Pendekatan penguatannya harus lugas pada pendekatan bisnis untuk membantu bisnis koperasi berkembang. Dari segi pendekatan, hal ini berarti memadukan antara pendekatan *supply driven* dengan *demand driven* dalam pemberian dukungan perkuatan kepada koperasi.

Koperasi memang hanya akan berkembang apabila ada orang yang peduli, menaruh perhatian kepada kepentingan hidup sesama karena koperasi adalah sesuatu metoda menjalankan bisnis yang modern dengan aturan main tidak sekedar bisnis. Inilah yang harus dipahami sebelum kita membahas wacana koperasi, karena jika tidak dipahami kita akan terjebak dalam penilaian maju tidaknya koperasi dari kaca mata pemiliknnya.

Sejak kemerdekaan pelebagaan koperasi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia harus diakui ditempuh melalui pola “penitipan”, yaitu dengan menitipkan koperasi pada tiga kekuatan ekonomi terpenting ketika itu. Ketiga jalur kekuatan ekonomi tersebut adalah : (i). Program Pembangunan Ekonomi Pemerintah (terutama koperasi desa dan koperasi pertanian); (ii). Lembaga-lembaga pemerintah, baik sipil maupun militer; dan (iii). Perusahaan-perusahaan Besar Nasional baik milik Negara maupun milik Swasta. Kedua jenis yang terakhir ini umumnya ditujukan kepada para konsumen. Hal ini secara sadar dilakukan karena kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya masih diliputi oleh beban tingkat pendapatan rendah dan sebagian besar hidup dalam kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sebagai organisasi modern koperasi memerlukan prasyarat yakni tingkat pendapatan anggota yang menggambarkan kemampuan partisipasi potensial seseorang harus cukup untuk mendukung sebuah bisnis yang bersaing atau dapat memenuhi kelayakan ekonomi. Keadaan ini masih diperparah lagi oleh kuatnya tradisionalisme kepemimpinan yang berseberangan dengan syarat hadirnya demokrasi dalam koperasi sebagai suatu nilai dasar koperasi.

Dengan cara berpikir semacam itu maka pengembangan koperasi di Indonesia lebih menekankan kepada basis kekuasaan yang dicerminkan oleh kekuasaan terhadap wilayah pemerintahan (koperasi berbasis wilayah seperti desa, wilayah unit desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan seterusnya). Di sisi lain wilayah kekuasaan ini juga diberlakukan bagi kekuasaan terhadap unit atau satuan kekuasaan berdasarkan unit pemerintahan, komando maupun satuan perusahaan/unit perusahaan. Strategi ini ditempuh karena yang diinginkan para pemikir koperasi pada saat itu adalah pertumbuhan lembaga koperasi (pelebagaan) agar segera dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan berperan nyata dalam perekonomian nasional. Strategi ini antara lain juga terlihat dari formula cita-cita posisi koperasi dalam UUD 1945 (bangun perusahaan yang sesuai), UU 12/1967 (urat nadi perekonomian), GBHN-GBHN dan UU 25/1992 (sokoguru perekonomian).

Dalam pengalaman Indonesia unsure membangun koperasi sebagai kerjasama pasar yang menjadi fenomena kelahiran koperasi di Eropa Barat dan Amerika tidak kelahiran sebagai ciri koperasi Indonesia. Hal ini karena ketika ingin menggerakkan koperasi Indonesia belum memiliki basis yang dibutuhkan untuk tumbuhnya sebuah koperasi yang rasional yaitu tingkat pendapatan per kapita yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang cukup. Inggris pada masa revolusi Industri yang bersamaan dengan lahirnya koperasi Rochdale memiliki pendapatan per kapita sekitar US \$ 500,-, sementara ketika Denmark memulai gerakan pendidikan untuk kebangkitan para petani yang menjadi program utama adalah petani harus mengenyam pendidikan pertanian tingkat atas (*landbouw school*) dan tingkat pendapatan perkapita ketika itu diperhitungkan Balile (Holeo metry) sekitar US \$ 350,-, Keadaan semacam ini baru kita capai pada saat kita memasuki memasuki dasawarsa delapan puluhan ketika pendapatan rata-rata per kapita masyarakat Indonesia berada pada tingkat sekitar Denmark pada akhir awal abad 18.

Meskipun Undang-Undang Koperasi yang menetapkan koperasi basis wilayah dengan proteksi dari persaingan sesama koperasi sesuai UU 12/1967 telah diganti dengan UU 25/1992 yang mendasarkan koperasi pada basis domisili dan membuka persaingan, namun praktis pelaksanaannya baru terjadi pada pertengahan 1998 ketika INPRE 4/19984 dicabut yang menandai berakhirnya reservasi KUD dan membuka KUD ke koperasi jalur normal. Dengan demikian pada saat ini format perkembangan koperasi adalah format koperasi basis wilayah yang dihadapkan pada format persaingan pasar, sehingga pembahasan tentang posisi koperasi menuju masa depan tidak terlepas dari bagaimana koperasi melalui masa transisi ini.

Untuk melihat posisi koperasi Indonesia sebelum melihat mengenai kondisi obyektif koperasi pada hari yang lebih penting adalah memahami kedudukan koperasi dalam konteks perekonomian Indonesia dalam konteks ekonomi pasar yang sedang berlangsung. Sisi normatif kedudukan penting koperasi terlalu sering dikaitkan dengan berbagai cita-cita nasional yang normative, tetapi jarang dipahami dalam konteks pasar yang diperlukan bagi orang diluar gerakan koperasi atau “*non student of cooperatives*”. Oleh karena itu pada bagian berikut ini akan dijelaskan fungsi koperasi dalam kerangka perekonomian pasar. Dan selanjutnya akan dikupas kondisi koperasi memasuki abad 21 sebagai pangkal tolak penyusunan proyeksi peran koperasi dan penyusunan langkah persiapan yang diperlukan. Dalam analisis proyeksi perkembangan koperasi digunakan metoda komparasi antar waktu dan antar kelompok dengan menekankan pada analisis struktur kekuatan koperasi.

Fungsi Koperasi Dalam Ekonomi Pasar

Dalam konteks ekonomi pasar koperasi sebagai asosiasi perorangan harus dilihat sebagai organisasi atau metoda menjalankan usaha untuk melakukan kerjasama pasar dari anggotanya sebagai pelaku ekonomi. Dalam suatu perekonomian, pelaku pasar adalah para produsen dan konsumen selain pemerintah yang disemua negara berperan melalui pelaku ekonomi, melalui aktivitas produksi dan konsumsinya. Sebelum melangkah lebih jauh perlu kita lihat posisi gerakan koperasi di dunia dalam memposisikan dirinya pada saat ini dengan melihat definisi koperasi sesuai Kongres Koperasi Dunia di Menchester 1995 sebagai berikut:

A cooperatives is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations trough a jointly-owned and democratically-connrolled enterprise.

Dalam konteks di atas pada dasarnya ada tiga tugas utama koperasi untuk membuat ekonomi pasar lebih “*fair*” di mata para pendukung koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (i) Koperasi mempunyai tugas utama untuk meningkatkan kapasitas produktif para anggotanya, sehingga mampu menghadapi persaingan pasar yang semata-mata

menekankan pada norma efisiensi. Dengan demikian koperasi harus mampu menjadikan para anggotanya lebih produktif dan lebih efisien dengan berkoperasi ketimbang mereka harus berusaha sendiri. Hal ini terutama dimiliki oleh Koperasi-koperasi yang didirikan para produsen. Sehingga yang menjadi dasar pengorganisasian koperasi selalu berkaitan dengan kehematan skala (*economies of scale*) karena adanya sifat kekakuan satuan investasi (*indivisibility of investment*), jaminan kualitas termasuk semangat baru akan kesadaran lingkungan hidup dan lain-lainnya. Ciri utama dari koperasi produsen selalu bergerak didataran pembelian bersama (input), pengolahan bersama (produk untuk nilai tambah) dan pemasaran bersama secara selektif sesuai struktur pasar komoditas (untuk memperbaiki posisi tawar dan menekan resiko).

- (ii) Meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama mereka yang berpenghasilan tetap yang rentan terhadap gejolak harga. Koperasi yang memfokuskan pada tugas ini pada umumnya dilakukan oleh koperasi konsumen yang menekankan pada kerjasama pasar untuk mendapatkan harga yang kompetitif, jaminan penyediaan barang yang lebih terjamin untuk menghindari kelangkaan dan jaminan kualitas produk yang lebih baik. Pada saat ini koperasi konsumsi sudah sedemikian jauh hingga sampai pada tataran manfaat yang maya atau “intangible” seperti kepemimpinan harga (Danish Brugsen di Denmark), produk ramah lingkungan (Koperasi Konsumen di Jepang) sampai pada berbagi produk asuransi dan jasa-jasa untuk kenyamanan (*pleasure*) seperti wisata dan lain-lainnya.
- (iii) Meningkatkan kemampuan anggota dalam menjaga kelancaran arus pertukaran yang efisien. Gerakan koperasi sadar bahwa pertukaran adalah wahana terpenting dalam suatu perekonomian pasar agar setiap orang dapat meningkatkan kesejahteraannya secara optimal dan para produsen mendapat balas jasa yang wajar. Instrumen terpenting dari pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat antara rumah tangga produsen dan konsumen adalah alat pembayaran. Oleh karena itu sayap terpenting dari gerakan koperasi di dunia adalah koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam yang siap membantu para anggotanya dalam menjaga likuiditasnya untuk mendapatkan posisi tawar pasar yang terbaik.

Dengan demikian pada dasarnya hanya ada tiga macam jenis jurusan pengembangan koperasi yang dikenal di dunia yaitu koperasi para produsen (atau juga sering disebut koperasi produksi), koperasi para konsumen (koperasi konsumsi), dan koperasi kredit. Di dunia pilar gerakan koperasi di masing-masing negara yang sangat maju selalu dapat dikaitkan dengan tiga ciri utama koperasi dimaksud.

Sebagai bagian sejarah panjang pengenalan koperasi di Indonesia melalui pola “titipan” penjenisan koperasi ini kurang dikenal, yang membuat rancu hingga pada hari ini adalah kebanyakan koperasi dibedakan menurut kelompok basis pengembangan, apakah berdasar atas wilayah, atau dibedakan basis kelompok profesi dan kemasyarakatan pengembangan koperasi dan kombinasi kedua-duanya (wilayah dan basis kemasyarakatan). Dengan demikian untuk memahami koperasi di Indonesia untuk sementara kita dapat menggunakan pengelompokan yang ada, namun dalam pemahaman

peta kekuatan koperasi harus selalu kita kembalikan kepada ke tiga pilar jenis koperasi tersebut. Sebagai konsekuensinya kegiatan universal koperasi Indonesia pada dasarnya adalah “kredit” sementara koperasi produsen akan terbatas pada sektor-sektor yang menghadapi kegagalan pasar yang serius sedangkan koperasi konsumen yang murni (dari, oleh dan untuk anggota) belum mampu berkembang. Salah satu alasan obyektifnya adalah cukup besarnya sumbangan sektor informal sebagai bentuk lapangan kerja yang pada dasarnya mensubsidi sektor modern (pasar).

Bagi perekonomian Indonesia, kita perlu mengaitkan dengan konteks Sistem Ekonomi Nasional Indonesia (SENI) dan kedudukan koperasi. Dari sisi produksi pelaku ekonomi di Indonesia terdiri dari Usaha Negara, Usaha Swasta Besar Nasional, Usaha Swasta Asing dan Usaha Ekonomi Rakyat dalam hal jumlah unit usaha. Sektor Ekonomi Rakyat yang mendominasi unit usaha yang ada di Indonesia terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Bagaimana kontribusi masing-masing terhadap jumlah unit usaha, sumbangan terhadap produk Domestic Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Dari sisi konsumsi sektor ekonomi rakyat kita secara mudah dapat kita kenali dari sektor rumah tangga yang memegang posisi penting dalam menentukan permintaan domestic karena memegang porsi terbesar (65% 1998) dari pengeluaran agregat. Pengeluaran rumah tangga yang mencerminkan kehidupan sektor ekonomi rakyat dapat dilihat dari komposisi rumah tangga berdasarkan pengeluaran di mana secara umum masih mendominasi oleh kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana kedudukan koperasi dalam Sistem Ekonomi Rakyat. Koperasi sebagai salah satu bentuk atau metoda menjalankan usaha merupakan salah satu bentuk atau organisasi perusahaan diantara para produsen kecil dan menengah di samping usaha perseroan milik negara, usaha swasta besar nasional maupun asing. Koperasi juga tidak mustahil sebagai salah satu diantara usaha besar sesuai kriteria Inpres 10/1999 yang menentukan usaha besar adalah usaha yang memiliki aset diatas sepuluh milyar rupiah di luar tanah dan bangunan. Di sektor produksi jasa koperasi adalah merupakan salah satu bentuk pengorganisasian pelayanan jasa keuangan sebagai lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Sementara di sisi konsumsi koperasi adalah merupakan organisasi para konsumen yang bergerak di dalam pelayanan jasa pemenuhan barang-barang konsumsi bagi rumah tangga. Dengan demikian koperasi konsumen sebenarnya lebih menyerupai perusahaan jasa bagi para konsumen (terutama kelompok menengah ke bawah) untuk menekan biaya transaksi dan mendapatkan nilai tambah serta jaminan pasar di sektor produksi. Dengan cara ini para konsumen dapat meningkatkan kesejahteraannya dan terjaga hak-haknya.

Dalam konteks organisasi, koperasi mempunyai aturan dan cara tersendiri dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu koperasi juga disebut sebagai gerakan, bahkan mempunyai kedudukan sebagai “observer” pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Koperasi yang usahanya mendasarkan pada prinsip pemilik adalah pengguna jasa koperasi telah merupakan suatu sistem gerakan dengan skala yang luas dan merupakan jaringan atas dasar kesamaan kepentingan dan aspirasi. Berbeda dengan koperasi yang segala nilai tambah yang diperoleh dialirkan kembali

kepada para anggotanya, maka di dunia juga mengenal adanya sistem lain yang mempunyai fungsi yang sama untuk menolong usaha kecil yaitu melalui sistem sub-kontrak. Usaha pada umumnya mampu menjadi lokomotif penarik bagi usaha kecil melalui wahana kemitraan. Oleh karena itu antara usaha menengah dan koperasi ini dapat mempunyai fungsi yang komplementer dalam memajukan usaha kecil. Pembagian tugas fungsional ini akan ditentukan oleh karakteristik fungsi produksi dari masing-masing kegiatan.

Satu fungsi lain dari koperasi, sebagai gerakan pendidikan dan gerakan memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek kelestarian lingkungan hidup koperasi juga mempunyai fungsi untuk mengangkat kemartabatan suatu masyarakat atau bangsa terutama dalam berekonomi. Karena sifat gerakan koperasi yang sering disebut sebagai "*quasi public*", maka cukup banyak barang-barang publik yang dihasilkan oleh koperasi yang dalam jangka panjang mungkin tidak dikenal lagi bahwa itu adalah bagian dari hasil gerakan koperasi. Di Indonesia pada dasawarsa 1960an cukup banyak koperasi yang meninggalkan fasilitas pendidikan dan kesehatan atau bahkan Asuransi Bumi Putera 1912 sebagai "*mutual company*" adalah contoh bentuk akhir yang ideal dari koperasi yang berhasil. Perusahaan Mutual pada awalnya didirikan oleh para pendiri atau sponsor dengan prinsip dari, oleh dan untuk anggota adalah model sebuah koperasi yang biasa disebut dengan "*sponsored cooperative*".

Dalam satu perekonomian pasar peran utama dari koperasi adalah menjadi wahana kerjasama pasar bagi para anggotanya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal melalui kegiatan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Dengan demikian koperasi tidak untuk memaksimalkan nilai tambah bagi "perusahaan koperasi" tetapi nilai tambah bagi para anggotanya. Oleh karena itu secara konseptual adalah "salah" menjadikan kontribusi dalam PDB sebagai ukuran keberhasilan koperasi. Indikator "eksistensi" koperasi dalam suatu perekonomian pasar adalah "pangsa pasar" koperasi dalam kegiatan atau sektor di mana jasa koperasi diperlukan. Dalam suatu kajian regional yang pernah dilakukan ukuran yang dianggap tepat adalah menempatkan koperasi di sektor-sektor "industri manufaktur" dan "tersier" atau jasa perdagangan (baik pembelian maupun distribusi) di mana koperasi menghasilkan nilai tambah.

Sementara itu untuk mengetahui posisi perekonomian rakyat dalam perkembangan perekonomian nasional telah diangkat tiga indikator penting yaitu: (i). jumlah penyerapan tenaga kerja; (ii) nilai tambah untuk masing-masing sektor; dan (iii). Ekspor produk usaha kecil dan menengah. Koperasi sebagai badan usaha dapat berdiri sebagai usaha kecil, menengah atau bahkan besar sesuai skala bisnis atau "omzet" dan besarnya aset yang dimilikinya, demikian juga para anggota koperasi akan diperhitungkan dengan cara yang sama.

POSISI PERKEMBANGAN KOPERASI PADA SAAT INI

Untuk menilai posisi koperasi pada saat ini paling tidak dapat kita lihat dari tiga indikator dasar yakni: (i). pelebagaan koperasi; (ii). Struktur aset dan perkembangan usaha; (iii). Perkembangan usaha inti koperasi memang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa selama dua tahun terakhir sejalan dengan semangat reformasi dan demokratis. Sejak dihapuskannya pola pembinaan koperasi ala INPRES 4/1948 gairah masyarakat untuk menggunakan koperasi sebagai bentuk badan usaha mereka sangat luar biasa. Pada akhir 1999 telah tercatat lebih dari 89.939 buah koperasi berstatus badan hukum di mana pada akhir tahun 1997 baru mencapai sekitar 52.000 buah.

Terhadap pesatnya pertambahan jumlah koperasi ini memang banyak catatan yang meragukan, terutama motif pendirian koperasi di masa krisis ekonomi dan periode pemulihan, karena dinilai didasari oleh motif untuk mendapatkan fasilitas sebagai “distributor” sembako maupun untuk mendapatkan “kredit mudah dan murah” seperti KUT. Cukup beralasan kritik tersebut, namun juga perlu diperhatikan, bahwa kita jangan menafikan realitas baru kesadaran berkoperasi di kalangan lembaga kemasyarakatan dan profesi yang sebelumnya tidak tersalurkan karena hambatan INPRES 4/1984. Di sini kita melihat organisasi profesi petani, nelayan, pekebun dan lain-lain serta organisasi kemasyarakatan, pemuda, wanita maupun kalangan pesantren giat mendirikan koperasi.

Koperasi-koperasi baru di luar pertanian justru termasuk koperasi yang tidak tersentuh oleh fasilitas. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa 86% koperasi yang ada tergolong aktif, walaupun harus diakui koperasi baru pada umumnya memiliki skala usaha yang kecil-kecil dengan kegiatan yang masih terbatas pada sektor keuangan dan jasa, terutama distribusi dan perdagangan eceran. Bagi generasi muda pelebagaan koperasi yang mudah juga memberikan status legal bagi mereka untuk memulai melangkah menjalankan bisnis. Pada saat ini proponent dari koperasi baru umumnya adalah para sarjana atau kalangan terdidik, bahkan juga didukung oleh para profesional yang terpaksa keluar dari lapangan kerja formal karena perusahaannya mati akibat krisis.

Dengan demikian pelebagaan koperasi yang cepat pada saat ini juga didukung oleh tersedianya sumberdaya manusia yang lebih profesional dibandingkan dengan pada masa pengenalan KUD di tahun 1970-an. Dari sini sebenarnya dibukanya kran pembentukan koperasi tidak perlu diikuti dengan prasangka negatif dan dapat dibiarkan mengikuti hukum pasar biasa. Memang terlalu dini untuk menilai optimisme dan pesimisme pelebagaan koperasi pada saat ini, tetapi orang-orang koperasi hendaknya sadar bahwa pada saat ini prasyarat untuk tumbuhnya koperasi atas dasar swadaya sudah ada. Prasyarat itu adalah, bahwa tingkat pendapatan perkapita rata-rata penduduk Indonesia sudah pernah melampaui US \$1.000,- dan pada saat ini masih berada di atas US \$ 600,- serta rata-rata pendidikan generasi muda Indonesia sudah jauh lebih tinggi. Sehingga kemungkinan koperasi melakukan seleksi keanggotaan untuk tujuan kelayakan sudah memungkinkan.

Mengenai kemajuan usaha koperasi terutama selama dua tahun terakhir ini tidak ada yang dapat memungkiri, bahwa koperasi telah bergerak meraih momentum terutama pada

masa pemulihan dari krisis. Sistem distribusi kita hampir lumpuh dan ekonomi rakyat mengambil tanggung jawab itu dengan tidak menghiraukan ketakutan seperti yang dialami usaha besar dan sektor distribusi modern. Koperasi dalam beberapa hal memang terlihat ikut berpartisipasi di dalamnya, tetapi yang lebih penting nampaknya justru bukan kegiatan koperasi secara langsung, tetapi dukungan koperasi di dalam perkulakan, jasa transportasi, penyediaan sarana produksi dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan permodalan melalui koperasi. Program pengaman terhadap dampak krisis untuk penganggur dan kelompok miskin telah ikut mempertahankan daya beli kelompok miskin untuk tidak lebih terpuruk, sehingga serapan terhadap produk yang dijual oleh usaha kecil terus berjalan.

Di sisi lain kucuran kredit yang dialirkan oleh pemerintah melalui perbankan terutama dalam upaya pemulihan produksi dan distribusi pangan dalam bentuk KUT dan KKOP juga telah menjadikan kelangkaan permodalan karena kemandegan sistem perbankan kita teratasi. Sejak awal krisis tahun 1998 KUT telah ditingkatkan dari Rp.374,6 milyar pada tahun 1997/98 menjadi Rp.8.336 milyar pada tahun 1998/99. Percepatan dan perluasan inilah yang sering menimbulkan masalah, walaupun kasusnya tidak besar karena banyak kejadian dan dibuka secara luas menimbulkan kesan seolah koperasi tidak layak menangani kredit. Perubahan skema kredit dan bank sebagai pelaksana (*executing*) menjadi penyalur (*chanelling*) dilakukan karena Bank tidak mampu lagi apabila pemerintah ingin memperbesar kredit kepada masyarakat perdesaan dalam rangka penanggulangan krisis. Dilihat besarnya kucuran kredit tahun 1998/99 adalah luar biasa dan tidak pernah terjadi dalam sejarah, namun demikian kredit tersebut juga diikuti oleh mandegnya pelayanan perbankan yang normal. Dengan demikian lonjakan kredit tersebut juga sekaligus merupakan katup pengaman untuk membuat perekonomian perdesaan dan ekonomi rakyat tetap dapat bergerak karena adanya daya beli di perdesaan.

Dengan berlakunya UU 23/1999 tentang Bank Indonesia, maka seluruh sistem perkreditan bagi petani dan koperasi melalui KLBI dihapuskan. Namun demikian untuk masa peralihan ini selain sistem konsorsium bagi KUT (maksimum Rp. 1,9 triliun hingga akhir September 2000) maka dilanjutkan sistem Surat Utang Pemerintah untuk KKOP dan kredit bagi usaha kecil lainnya. Dengan demikian pada saat ini sebenarnya sedang terjadi rasionalisasi sistem perkreditan bagi petani, usaha kecil dan koperasi menuju sistem perkreditan melalui perbankan yang normal. Oleh karena itu yang dapat kita catat aliran angsuran/pengembalian kredit oleh koperasi kepada perbankan dibandingkan dengan aliran kredit yang dikucurkan oleh perbankan kepada koperasi pada tahun 1999/2000 mengalami priode yang dinamakan kontraksi. Jadi sebenarnya perbankan pada saat ini sedang mengalami aliran masuk netto dan koperasi sedang mengalami penarikan modal oleh perbankan, karena kredit yang sudah jatuh tempo.

Koperasi yang tersentuh oleh program kredit pemerintah pada dasarnya merupakan bagian kecil populasi koperasi yang ada, namun cukup signifikan bagi penyediaan koperasi yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu pendalaman kitamengenai struktur aset dan komposisi jenis usaha koperasi yang ada pada saat ini sangat penting untuk menetapkan ke mana arah kebijakan koperasi harus dilakukan. Perbandingan struktur aset koperasi secara garis besar dapat dipisahkan untuk sektor

finansial dan sektor non-finansial sesuai dengan keunikan masing-masing koperasi. Untuk koperasi yang bergerak di sektor finansial yang dilakukan melalui kegiatan simpan pinjam (perkreditan) biasanya dilakukan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit maupun koperasi serba usaha dan koperasi lainnya melalui unit simpan pinjam yang dikelola secara otonom. Secara umum unit usaha simpan pinjam pada bukan koperasi simpan pinjam merupakan motor penggerak kegiatan koperasi. Bahkan akhir-akhir ini berdasarkan laporan koperasi sekunder menunjukkan bahwa unit simpan pinjam telah berkembang dengan sangat baik selama setahun terakhir ini.

Struktur penguasaan aset oleh masing-masing jenis koperasi selama dua tahun terakhir sejak krisis dapat kita lihat dari data perkembangan berikut:

	1998	1999
a. Atas keseluruhan Koperasi (Rp milyar)	9.453	14.588
b. Aset Kop. Simpan Pinjam/USP (Rp. Milyar)*	5.812 (61,48%)	5.789 (39,68%)

*) Data posisi 31 Agustus

Dominasi usaha simpan pinjam dalam kehidupan koperasi ini sejalan dengan sejarah kemajuan yang dialami koperasi-koperasi di negara maju dan berkembang, karena sifatnya yang mudah untuk memperluas basis keanggotaan tanpa memerlukan kesamaan identitas kegiatan ekonominya. Di sisi lain dilihat dari penyebaran menurut propinsi, maka aset koperasi di Indonesia pada tahun 1999 terkonsentrasi di tiga propinsi utama seperti jatim (34,6%), Jawa Barat (12%) dan Jawa Tengah (11%). Menonjolnya posisi Jawa Timur ini disumban oleh melonjaknya Aset KOPONTREN, meskipun tanpa KOPOTREN Jatim masih mendominasi sekitar 21% aset koperasi Indonesia. Sementara dilihat dari basis pengembang koperasi penguasaan aset terbesar terdapat pada KUD, KPN dan Koperasi Karyawan. Aset koperasi sangat penting untuk memberikan gambaran potensi tumbuh dalam suasana minimnya dukungan pembiayaan pemerintah.

Posisi kredit perbankan yang berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia secara keseluruhan pada saat pengalihan (posisi 15 Nopember 1999) mencapai Rp. 22 triliun yang umumnya disalurkan melalui koperasi, baik untuk sektor pertanian maupun di luar pertanian. Jika kita bandingkan total pinjaman koperasi kepada nasabah melalui koperasi dan unit simpan pinjam hingga 31 Agustus 1999 mencapai Rp. 4.133 milyar atau hampir 19% dari seluruh kredit perbankan kepada koperasi dan UKM. USP dalam koperasi dan KSP adalah simbol kemandirian koperasi, karena mereka berkembang atas dasar swadaya koperasi atau kerjasama dengan perbankan atas pertimbangan komersial biasa. Jangkauan pelayanan USP/KSP dapat dilihat dari jumlah nasabah yang dilayani yang mencapai hampir 11 juta orang nasabah. Pada saat ini dapat dipastikan pangsa pinjaman USP.KSP terhadap total kredit perbankan kepada koperasi menjadi lebih besar, karena perbankan melakukan kontraksi kredit kepada koperasi. Dengan demikian sumbangan terbesar

koperasi dalam suasana kontraksi kredit perbankan adalah menjadi pengganti penyediaan kredit bagi usaha kecil.

Meskipun peran KUD tetap terbesar dalam penguasaan aset dan kegiatan usaha koperasi, namun pangasanya dalam keseluruhan koperasi sudah terus menurun sejak 1997, di mana hal ini telah diperkirakan sejak jauh sebelumnya. Untuk melihat kekuatan koperasi secara individual barangkali relevan untuk melihat rata-rata bisnis/koperasi untuk berbagai jenis koperasi menurut basis pengembangannya. Koperasi yang memiliki rata-rata omzet di atas Rp. 3 milyar/tahun karya dibukukan oleh Koperasi Listrik sementara yang berada di atas Rp. 2 milyar/tahun adalah KOPTI, sedangkan untuk di atas Rp 1 milyar/tahun adalah KUD dan Koperasi Perumahan. Koperasi-koperasi sekunder karena variasi besarnya usaha sangat tajam maka rata-rata hanya mendekati Rp 1milyar/tahun. Namun demikian untuk koperasi besar seperti GKBI, INKUD, IKPN dan KOPTI pasti dalam jajaran teratas dari koperasi sekunder.

Secara kualitatif kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk membuka pasar domestik juga telah menumbuhkan kesempatan kepada koperasi untuk mengadakan interaksi langsung dengan pasar global. Jika pada tahap awal koperasi lebih banyak bergerak di bidang impor barang-barang kebutuhan anggota baik untuk kebutuhan konsumsi maupun bahan baku produksi, maka akhir-akhir ini telah mulai berkembang kearah kerjasama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seperti potensi kelautan dan sektor pengolahan hasil pertanian lainnya. Keterbukaan juga membuat potensi pasar koperasi di dalam negeri mulai diperhitungkan oleh para produsen dan calon investor di luar negeri. Oleh karena itu posisi ini harus dimanfaatkan oleh koperasi, karena perdagangan yang bebas dalam suasana persaingan yang sehat akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan pembagian hasil yang wajar.

Proyeksi Peran Koperasi Ke Depan

Tahun 2003 sebagai permulaan berlakunya AKTA merupakan tongkat penting bagi koperasi Indonesia, karena akan menentukan corak koperasi yang masih akan bertahan ke depan. Dalam hal ini patut dilihat dalam konteks daya saing produksi yang dihasilkan para anggota koperasi, sehingga daya saing koperasi tidaklah berdiri sendiri. Secara umum problematik peningkatan daya saing kita justru bukan terletak persoalan perbandingan dalam kelangkaan sumber daya, tetapi justru pada persoalan “kemampuan manerial” dalam mengelola setiap lini proses dalam menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa di dalam dan luar negeri. Kelemahan “*competitive strength*” kita terletak pada rendahnya kemampuan kita untuk menghasilkan “*competitive advantage*” dalam suasana sebagian besar kegiatan produksi kita memiliki “*comparative advantage*”. Jika demikian kondisi yang kita hadapi, maka focus yang menjadi perhatian gerakan koperasi haruslah pada kemampuan memanfaatkan permintaan domestik, baik dalam pasar input produksi maupun pasar barang dan jasa untuk konsumsi.

Dari pengalaman gerakan koperasi di Indonesia selama dua tahun proses leberalisasi perdagangan yang diikuti oleh rasionalisasi fasilitas bagi koperasi, justru memperlihatkan

semakin intensifnya kontak terhadap dunia luar oleh gerakan koperasi, baik yang berkaitan dengan impor barang maupun ekspor produk-produk yang merupakan produk unggulan, terutama produk etnik (furniture, produk kerajinan) dan produk berbasis sumber alam. Kesulitan koperasi justru disebabkan oleh “instabilitas nilai tukar rupiah” ketimbang tidak adanya permintaan dan kemampuan pembiayaan. Dengan demikian liberalisasi perdagangan bukan suatu *momok* bagi koperasi untuk berkembang. Bahkan liberalisasi perdagangan yang dilakukan secara bertahap melalui penghapusan tata niaga dan penghapusan hambatan non-tarif telah memberikan kesempatan bagi koperasi untuk belajar, sehingga pada saat perdagangan bebas diberlakukan penuh yang dimulai dengan AFTA koperasi Indonesia akan menjadi terbiasa dalam alam tersebut.

Problematik yang dihadapi ekonomi nasional kita pasca krisis adalah pengangguran yang meluas dan sensitifitas nilai tukar rupiah yang tinggi. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh koperasi, terutama yang bergerak dalam jasa pemasaran akan menjadi terkendala untuk berkembang. Hal ini antara lain karena banyaknya pencari kerja yang masuk ke dalam lapangan kerja yang mudah dan itu biasanya berada di sektor jasa perdagangan eceran barang kebutuhan pokok yang dari segi permintaan terjamin ada setiap hari mereka bahkan rela mendapatkan margin yang kecil untuk sekedar bertahan hidup dalam sektor yang bersifat informal. Dalam situasi semacam ini kegiatan pemasaran oleh koperasi biasanya tidak kompetitif karena adanya faktor structural yang menimbulkan perbedaan “biaya financial” dan “biaya ekonomi”.

Pertumbuhan koperasi akan terletak pada sektor yang mempunyai karakteristik universitas kebutuhan individu yang tinggi, karena hanya kegiatan semacam ini yang mudah mencapai kelayakan ekonomi serta kemampuan jangkauan pelayanan yang meluas melampaui batas kesamaan kegiatan ekonomi. Dua pilar utama kemajuan koperasi dalam dasawarsa yang akan datang ini terletak pada “usaha jasa keuangan” dan “kegiatan pembelian bersama”. Dua kegiatan ini akan menjadi ciri kegiatan yang dapat menjadikan lokomotif kebangkitan koperasi di Indonesia untuk menjadi koperasi mandiri. Koperasi harus mulai semata-mata berhitung untuk pertimbangan bisnis bagi pelayanan kebutuhan anggota maupun bisnis yang dimandatkan anggota. Sesuai dengan semangat kebebasan koperasi dan rasionalisasi fasilitas, koperasi harus dapat bernegosiasi dan menolak terhadap tuntutan partisipasi koperasi yang tidak memberikan manfaat bagi anggotanya atau menimbulkan kerugian atau resiko kerugian terhadap koperasi.

Melihat posisi koperasi pada saat ini di mana aset koperasi sudah di dominasi oleh kegiatan koperasi di bidang jasa keuangan, maka restrukturisasi kegiatan koperasi sebenarnya sudah berjalan dengan demikian akan mampu tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi secara agregat. Rasionalisasi kredit perbankan bagi sektor tertentu, terutama pertanian, akan membuka peluang baru bagi usaha di bidang jasa keuangan baik dalam kegiatan simpan pinjam maupun perbankan seperti BPR milik koperasi. Posisi struktur usaha koperasi di Indonesia saat ini sangat kompotibal untuk menanggapi rasionalisasi kredit perbankan kepada petani dan belum menanggapi rasionalisasi kredit perbankan kepada petani dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Di sektor riil, kegiatan pembelian baik oleh koperasi produsen seperti KUD, Koperasi Pertanian, dan Koperasi Perikanan masih mendominasi kegiatan pembelian bersama pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya. Sementara koperasi konsumen sedang mempersiapkan kegiatan perkulakan atau pembelian bersamaan dan membangun jaringan, sehingga perannya untuk menjadi motor pertumbuhan koperasi semakin terlihat. Koperasi akan menikmati keuntungan dari dibukanya perdagangan luar negeri, sehingga arus penyediaan barang dan jasa baik untuk input maupun tujuan konsumsi akan semakin besar, sehingga dukungan pembiayaan atau ciptaan mekanisme pembiayaan bersama dalam bentuk konsorsium perlu dilakukan koperasi.

Prospek kegiatan koperasi di bidang agroindustri akan sangat tergantung pemulihan di sektor perbankan. Karena pada dasarnya di sektor produksi bahan baku telah siap seperti pada sub-sektor perkebunan terutama kelapa sawit. Di Jawa yang selama ini sebagian besar menjadi sub-sistem industri gula pasir tebu harus bekerja keras dengan merubah paradigma pengembangan agroindustri gula, dari orientasi agroindustri gula pasir menjadi agroindustri berbasis tebu. Dengan demikian harus berpikir untuk memisahkan diri dari efisiensi pabrik gula yang sesuai dengan rencana jangka panjang harus ditutup untuk direlokasi ke luar Jawa, ini berarti pabrik gula yang akan tinggal di Jawa hanyalah pabrik yang efisien yang mampu bertahan hidup dengan tanpa intervensi pemerintah untuk mendapatkan bahan baku. Sebaiknya gerakan koperasi melakukan tekanan untuk dapat ikut mengelola pabrik gula bersama BUMN untuk menjamin stabilitas produksi gula oleh pabrik-pabrik yang benar-benar dinilai telah efisien.

Implementasi undang-undang bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan DINAS di tingkat propinsi yang disertai tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.

KEBIJAKAN YANG DIPERLAKUKAN UNTUK Mendukung KEMAJUAN KOPERASI

Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demikian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di daerah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah akan dapat mendestralisasi pengembangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah koperasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.

Di masing-masing daerah dapat mengembangkan pusat inovasi dan teknologi yang dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha, perbaikan kualitas produk dan informasi pasar. Pusat ini juga dapat dikaitkan dengan system jaringan informasi dan bisnis elektronika bagi pengembangan sistem distribusi koperasi. Pusat informasi inovasi dan pengembangan teknologi ini merupakan dukungan perkuatan bagi usaha kecil dan menengah yang sangat dibutuhkan sebagai dukungan *non financial/Business Development Service*.

Tugas mendesak bagi koperasi pada saat ini adalah melakukan konsolidasi informasi keuangan koperasi yang berada di perbankan. Konsolidasi informasi ini akan memungkinkan gerakan koperasi mempunyai kekuatan untuk menghadapi perbankan misalnya melalui penyatuan kode rekening koperasi, pengelolaan lalu lintas informasi posisi keuangan untuk dapat menciptakan kekuatan negosiasi bagi penetapan “*gearing ratio*” bagi koperasi. Konsolidasi ini tetap menghormati kerahasiaan masing-masing koperasi tetapi memberikan kekuatan bersama untuk bernegosiasi dengan Bank.

Koperasi-koperasi sekunder tingkat propinsi harus menjadi barisan terdepan untuk merintis pembelian bersama, terutama untuk produk-produk yang diimpor atau dibeli dari pabrikan dan perusahaan besar. Untuk ekspor dapat dilakukan melalui koperasi atau melalui kerjasama dengan mengundang koperasi luar negeri untuk membeli di Indonesia. Hal ini untuk mempermudah proses belajar dan menghindari resiko penolakan akibat ketidakcocokan masalah standar.

KOPERASI DAN KORPORASI AGRIBISNIS : KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PERDESAAN MASA DEPAN

Potensi pertanian Indonesia terutama adalah karena besarnya potensi petani di dalamnya. Akan tetapi selama ini kita menyaksikan bahwa petani belum memiliki organisasi yang mampu meningkatkan posisi tawar dalam transaksi produktifnya. Berbeda dengan pedagang, pabrikan, eksportir dan lain pelaku lainnya, mereka telah memiliki perkumpulan atau asosiasi yang mendukung kebutuhan para anggotanya. Kalaupun para petani telah memiliki organisasi, umumnya organisasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan posisi tawarnya.

Institutional building sebagai prasyarat keharusan dalam pengembangan agribisnis yang bagian terbesar pelakunya petani “kecil dan gurem” adalah bangun koperasi dan koperasi agribisnis. Secara substansial, upaya kelembagaan tersebut pada dasarnya dapat dipandang sebagai langkah menuju rekonstruksi ulang dalam penguasaan dan akses sumberdaya produktif di bidang pertanian, terutama berkaitan dengan pengembangan agribisnis. Koperasi lebih merupakan *soft-step reconstruction*, sementara korporasi lebih merupakan rekonstruksi yang lebih “radikal”, atau *hard-step reconstruction*.

Menghadapi milenium ketiga dimana sistem pasar akan mendominasi dan persaingan menjadi semakin ketat, harus dicari bentuk kelembagaan yang tepat bagi pertanian kita.

Bangun kelembagaan koperasi dipandang salah satu sosok yang tepat, mengingat entitas tersebut berciri sebagai asosiasi (perkumpulan orang/petani), badan usaha dan juga sebagai suatu gerakan yang bersifat *growth from within* (untuk melawan penindasan ekonomi dan ketidakadilan sistem pasar). Apabila mengamati sejarah lahirnya koperasi yang tumbuh dari masyarakat kecil serta prinsip-prinsip yang dianutnya, maka terasa bahwa bangun organisasi inilah yang sesuai bagi petani dalam kegiatan pertaniannya, karena diharapkan mampu mendorong pengembangan usahanya, tidak saja dalam sosok sebagai lembaga ekonomi, akan tetapi merupakan lembaga sosial bagi para anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas, semakin di yakini bahwa sosok kelembagaan koperasi adalah bangun organisasi yang tepat untuk pengembangan masyarakat pertanian, dan telah terbukti di beberapa negara mampu meningkatkan daya saing petani. Dengan sosok kelembagaan tersebut diharapkan berkembang kemampuan menangani aspek *economic of scale* dan *economies of scope* dalam sistem produksi, pengolahan, pemasaran secara keseluruhan. Misalnya, koperasi dapat mengkoordinasikan suplai input secara lebih baik dan lebih murah. Demikian juga dengan *bargaining position* pada saat mereka akan menjual hasil produksinya. Pemerintah selaku fasilitator diharapkan dapat menumbuhkan kondisi yang mampu mendorong berkembangnya koperasi pertanian agar potensi besar yang mereka miliki dapat tumbuh menjadi kekuatan besar, sehingga kondisi harmonis baik secara sosial, ekonomi maupun ekologi dapat kita capai.

Jika menurut sejarahnya, koperasi di Indonesia memang berkembang penuh dengan romantika sebagai akibat “terlampau kuatnya” dukungan pemerintah dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga dalam banyak hal menjadikan sosok koperasi di Indonesia sempat “kehilangan” jati dirinya. Di kalangan masyarakat sendiri, masih beragam pendapat tentang eksistensi koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia saat ini. Sebagian *apatis*, sehingga memerlukan pengkajian ulang mengenai eksistensi koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. Sebagian lain memandang koperasi sebagai *entitas* perlu dikembangkan, walaupun seadanya saja. Sementara itu, berbagai pendapat lain merasa penting untuk mengembangkan koperasi sebagai sosok kelembagaan ekonomi yang kokoh bagi pemberdayaan masyarakat. Pendapat terakhir ini meyakini bahwa koperasi sebagai upaya kelembagaan dapat merupakan instrument bagi upaya restrukturisasi ekonomi pertanian, untuk mewujudkan keseimbangan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi pertanian. Ada dua argument yang melandasi pendapat ini, yaitu (a) secara kolektif, koperasi dapat penghimpun para pelaku ekonomi pertanian dalam menjual produk-produk yang dihasilkannya dengan posisi tawar yang baik, dan (b) koperasi secara organisasi dapat menjadi wadah yang bertanggungjawab bagi kebutuhan pengadaan saprotan maupun kebutuhan lain secara bertanggungjawab pula.

Walaupun demikian, ke depan, usaha-usaha untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bagi pengembangan agribisnis di perdesaan tahap awal tetap masih membutuhkan “ulur tangan” (kebijakan pemihakan) pemerintah secara langsung, akan tetapi dengan pengertian bentuk “ulur tangan” pemerintah tersebut harus ditempatkan dalam upaya pengembangan iklim berusaha yang sesuai. Misalnya, pengembangan program dan metoda penyuluhan pertanian yang diarahkan kepada upaya pengembangan orientasi dan kemampuan kewirausahaan, yang lebih mencakup substansi manajemen

usaha dan penyesuaian terhadap materi-materi di bidang produksi dan pemasaran. Dalam hubungan ini maka pola magang dan sistem pencangkokan manajer dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan.

Masalah kalangan kapital yang seringkali menjadi kendala pengembangan agribisnis memerlukan kebijakan secara lebih hati-hati. Pemberian kredit yang murah seringkali justru dapat berakibat buruk bagi perkembangan kegiatan usaha dalam jangka panjang, jika tidak diikuti dengan upaya-upaya pengendalian yang baik. Alternatif yang dinilai lebih sesuai adalah dengan mengembangkan koperasi agribisnis yang menyediakan fasilitas kredit yang mudah, yaitu kredit yang memiliki kemudahan dalam perolehannya, kesesuaian dalam jumlah, waktu serta metode peminjaman dan pengembaliannya. Disamping itu pemberian kredit tersebut perlu di atur sedemikian sehingga kemungkinan re-investasi dan keberhasilan usaha dapat lebih terjamin. Dalam hal ini bentuk *supervised credit* dapat menjadi alternative model pemberian kredit. Banyak contoh sukses koperasi kredit di bidang agribisnis yang kuat dan besar, seperti *Credit Agricole* di Perancis, Rabobank di Belanda, dan lain-lain.

Pengembangan agribisnis dengan agro-industri perdesaan juga perlu didukung oleh kelembagaan yang sesuai, mengingat kerarakteristiknya yang sangat beragam. Dalam kelembagaan usaha tersebut misalnya, perlu dikaji kombinasi optimal dari penguasaan dan pemanfaatan skala usaha dengan efisiensi unit usaha, sesuai dengan sifat kegiatan yang dilakukan. Salah satu contoh, jika kegiatan, agroindustri memang akan lebih efisien apabila dilakukan dalam skala yang relative kecil, maka pengembangan kegiatan usaha individual perlu didorong. Akan tetapi untuk kegiatan pengangkutan yang memerlukan skala kegiatan yang lebih besar, perlu dipertimbangkan suatu unit kegiatan yang sesuai pula. Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya kondisi, dimana kegiatan agroindustri dilakukan secara individual (tidak harus dipaksakan berada dalam unit usaha koperasi dalam bidang pengangkutan. Hal-hal semacam memerlukan penelaahan lebih lanjut secara mendalam, dikaitkan dengan sosok spesifik unit usaha yang dikembangkan dalam koperasi agribisnis tersebut.

Oleh karena itu, dalam operasionalisasi pengembangan agribisnis/agroindustri di tingkat lokalita (kawasan perdesaan) akan dijumpai pula kondisi yang sangat beragam baik dari segi agroekosistem, sarana dan prasarana maupu kondisi sosial budayanya. Keragaman-keragaman tersebut jelas menghendaki rancangan bangun kelembagaan yang mampu teknokogi. Dalam hal ini, beberapa contoh berkembangnya model-model kelembagaan agribisnis seperti SPAKU, KUBA, Desa Cerdas Teknologi, ULP2, Gerakan Kemitraan, Inkubator, Klinik Tani/Agribisnis, Asosiasi-asosiasi Petani, pemanfaatan tenaga-tenaga perekayasa professional yang berfungsi sebagai konsultan dan nara sumber, harus dipandang sebagai langkah esensial untuk mengakumulasikan modal sosial (*social capital*) yang harus terus-menurus didorong sebagai embiro dalam mewujudkan *institutional building* yang akan memperkokoh posisi tawar petani dalam agribisnis.

Pada saat ini, struktur pasar produk-produk pertanian bersifat oligopoli, dalam wujudnya sebagai perusahaan multinasional, dengan kekuatan luar biasa besarnya. Harga-harga produk pertanian dunia dikondisikan oleh keputusan-keputusan perusahaan multinasional

ini. Industrilisasi pertanian seharusnya sejalan dengan pengembangan kemampuan petani untuk beradaptasi dengan perusahaan-perusahaan multi nasional, sehingga menjadi medan untuk mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan petani Indonesia.

Terkendalanya petani akibat masalah teknis dan akses sebagaimana selama ini merupakan pembatas utama bagi peningkatan posisi tawarnya, memerlukan hadirnya kelembagaan yang dapat mengatasi hal itu. Sebagai individu, petani sangat terbatas dalam aspek-aspek *property rights*, batas-batas yurisdiksi dan aturan representasi sebagai individual. Misalnya, masalah-masalah teknis seperti skala ekonomi, dan ketiadaan akses sebagaimana dimiliki oleh individu pengusaha dalam wujud institusi perusahaan.

Dalam wujud perusahaan, seseorang atau sekelompok orang, memiliki *property rights*, batas-batas yurisdiksi dan aturan representasi yang lebih luas dari pada sebagai individu manusia. Institusi dalam wujud perusahaan memperluas kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan usaha/kerja, martabat dan kesejahteraan petani. Pemikiran ini bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum banyak menghasilkan kinerja petani yang lebih baik, seperti yang terjadi di negara-negara maju.

Korporasi petani dalam bidang agribisnis telah menjadi wacana dan diskusi publik sebagai suatu *institutional building*. Korporasi masyarakat (petani agribisnis) pada dasarnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat pada dasarnya akan menjadi kuat manakala memanfaatkan segenap *social capital* yang ada pada masyarakat tersebut. Contoh yang dikemukakan adalah pelajaran dari pengalaman empirik perusahaan American Crystal Sugar Company (ACSC) yang dibeli oleh 1300 petani pada tahun 1973 melalui NYSE senilai US\$ 86 juta. Sejak saat itu, ACSC berkembang pesat, baik dalam areal, produksi, rendemen, kepemilikan petani, dan *joint ventures*. Demikian pula, pelajaran yang dikembangkan di Malaysia dalam merestrukturisasi kepemilikan saham melalui skema Amanah Saham Nasional tampaknya dapat menjadi bahan pengkajian.

Korporasi petani sebagai suatu kelembagaan ekonomi misalnya, adalah suatu lembaga/perusahaan yang dimiliki oleh petani. Dalam sosok tersebut, kepemilikan petani ini dinyatakan dalam bentuk kepemilikan individual dan kolektif selalui lembaga koperasi sekaligus. Kepemilikan yang sifatnya individual dirancang agar petani secara individual langsung dapat berpartisipasi dalam pengembangan kesempatan-kesempatan dan memanfaatkannya.

Sedangkan kepemilikan kolektif ditujukan agar organisasi petani dapat menjalankan fungsinya. Korporasi petani pada dasarnya merupakan kumpulan petani sekaligus juga kumpulan modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta modal sosial seperti semangat serta dukungan dari para pihak yang memiliki kesadaran untuk terwujudnya industrialisasi pertanian di Indonesia.

Korporasi petani pada dasarnya harus berkembang dan tersebar menurut persebaran komoditas-komoditas pertanian. Fungsi utama daripadanya adalah sebagai berikut: (i) pelayanan jasa desain industri disetiap wilayah pengembangan (agropolitan); (ii) pelayanan jasa “*brokerag*” dalam permodalan dan seleksi teknologi, (iii) pelayanan jasa

pelatihan dan pengembangan produk serta manajemen industri, (iv) pemasaran produk, (v) negosiasi-negosiasi atau *lobby* dengan para pihak terkait, khususnya Pemerintah.

Kunci awal dari semua proses industrilisasi tersebut adalah pengembangan budaya industri dalam masyarakat petani. Dengan berkembangnya budaya industri ini, petani terbuka kesadarannya untuk menentukan prioritas-prioritas yang sesuai dengan dirinya dan memiliki potensi pasar yang baik. Selanjutnya, atas dasar ini maka dikembangkan pentahapan pengembangan institusi industrilisasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang diperlukan. Apabila ini berhasil maka tahap selanjutnya adalah tahap ekspansi. Dalam semua proses ini diperlukan pendampingan atau dukungan dari kalangan profesional dalam bidang industri pertanian.

Berdasarkan konstruksi pikiran-pikiran di atas, dipahami bahwa membangun pertanian, agribisnis di perdesaan yang dikemukakan pada dasarnya mengembangkan upaya kelembagaan (*institutional building*). Institusi atau kelembagaan adalah suatu *rules* yang merupakan produk dari nilai, yang diharapkan terus berevolusi dan menjadi bagian dari budaya (*culture*). Hal itu merupakan prasyarat keharusan (*necessary condition*) untuk menjadi “kunci pembuka” pengembangan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkeadilan. Secara operasional, sosok koperasi agribisnis dan koperasi (masyarakat, petani) semacam Badan Usaha Milik Petani dipandang sebagai bangun kelembagaan yang mampu berperan dalam mewujudkan pembangunan pertanian sebagaimana yang divisikan.

Mewujudkan upaya di atas tidaklah mudah dan sederhana. Karakteristik, keunikan dan keragaman yang tinggi pada berbagai kegiatan agribisnis di satu pihak, serta dinamika permintaan dan konsumsi yang sangat tinggi memerlukan manajemen pengelolaan yang terintegrasi sebagai suatu syarat kecukupan (*suffiecient condition*).

Diyakini, kunci utama untuk dapat memanfaatkan segenap *social capital* yang ada pada masyarakat adalah terletak pada kualitas sumberdaya manusia. Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana membangun SDM yang ada (dengan latar belakang dan kualitas yang berbeda-beda) menjadi suatu *team work* yang harmonis. Banyak persoalan inefisiensi kelembagaan yang disebabkan oleh ketidak-harmonisan SDM yang terlibat di dalamnya.

WILAYAH OTONOM SEBAGAI BASIS PEMBERDAYAA

Ekonomi rakyat pada hakekatnya berada di daerah otonom dan daerah otonom mempunyai kepentingan sama untuk melangsungkan status otonomi secara mandiri. Oleh karena itu dengan menempatkan daerah otonom sebagai basis penilaian untuk menggerakkan pemberdayaan ekonomi rakyat akan mempermudah menemu kenali persoalan secara tepat serta menghindarkan diri dari perdebatan makro yang tidak perlu. Di banyak negara seperti Kanada pengaturan mengenai kredit pertanian, koperasi dan lain-lain justru ditempatkan pada pengaturan oleh daerah melalui *local government act*

untuk memberikan perhatian terhadap masalah khusus yang perlu diberikan pada sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus. Daerah otonom memerlukan lembaga-lembaga lokal, terutama lembaga keuangan yang dapat menahan arus aliran sumberdaya (keuangan) ke luar daerah dan sekaligus membangun kekuatan pengimbangan untuk menarik investasi dalam rangka meningkatkan kepada investasi per satuan unit usaha (*to increase investment density*). Hal ini pada gilirannya akan menjamin arus yang adil dalam sumberdaya keuangan antara daerah dengan pusat-pusat penarikan. Thesis dasar yang hendak diuji dan diwujudkan adalah dengan penguatan sumberdaya lokal pada basis rakyat yang luas akan memperkuat posisi tawar nasional.

Pemberdayaan ekonomi daerah berarti gerakan menyeluruh untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Unit analisis makro diturunkan menjadi tingkat daerah otonom dan untuk sementara, kita lepaskan dari indikator makro perekonomian yang lazim digunakan seperti inflasi, nilai tukar dan pertumbuhan. Dalam hal ini kita lebih mengutamakan analisis pada unit mikro tentang jumlah orang yang termajinalisasi oleh proses pertumbuhan/pembangunan atau perubahan lainnya yang tidak mampu ditanggapi oleh individu tersebut yang menyerupai indikator sosial yang lazim diterima dan mempunyai kemampuan komparasi. Sebagai contoh indikator yang paling mendasar adalah jumlah penduduk miskin, penduduk kurang gizi, jumlah penduduk yang tidak usia muda yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Kesemuanya ini diturunkan dari tujuan nasional yang termuat dalam pembukaan UUD yaitu meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsa. Cara pandang ini akan lebih memudahkan kesalahpahaman dan perdebatan persoalan indikator kemajuan ekonomi yang akhirnya berlanjut pada masalah sistem ekonomi dan realitas sistem pasar yang kita anut, oleh karena itu focus agenda kita adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dalam sistem pasar perekonomian Indonesia.

Secara teoritis daerah merupakan basis penciptaan surplus karena tingkat konsumsi rendah, investasi rendah sementara pada akhir-akhir ini menjadi penerima *transfer netto* yang besar. Dalam setiap pengalaman pembangunan sektor tradisional (pertanian/primer) selalu menjadi penyedia tabungan bagi pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu *platform* dasar penguatan ekonomi rakyat yang berarti penguatan ekonomi rakyat yang berarti penguatan ekonomi daerah adalah menjamin aliran modal dari daerah yang tidak bias pada pengurusan sumberdaya daerah dan pedesaan. Hal ini diyakini hanya dapat dikerjakan dengan penguatan basis lembaga keuangan, baik modern maupun tradisional serta bank maupun bukan bank. Untuk perbankan, jenjang terendah bank basis daerah yang kita miliki baru pada tingkat propinsi dengan Bank pembangunan Daerah untuk Bank Umum sehingga arus pengurusan dana ke pusat-pusat kota masih belum dapat dihindarkan, meskipun masih lebih berorientasi ke daerah dibanding yang terpusat di ibukota. Bank-bank yang dapat dikategorikan mempunyai perhatian kewilayahan karena kedudukannya masih sangat terbatas dan tidak kuat. Di luar bank umum terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mempunyai basis yang lebih lokal pada daerah otonom. Tujuan utama penataan lembaga keuangan di daerah adalah untuk menjamin aliran modal yang adil dan lebih berorientasi pada kesempatan daerah agar percepatan penyediaan layanan keuangan secara massive dan berorientasi pasar dapat segera ditumbuhkan. Pada gilirannya upaya ini akan meningkatkan kedalaman derajad monetisasi pedesaan dan tidak hanya dalam arti agregat tetapi juga kualitas transaksi.

Dalam penataan keuangan di daerah basis pelayanan terluas dapat diletakkan pada lembaga keuangan mikro, terutama koperasi yang sudah jelas kedudukan entitas legal, sistem dan mekanisme serta referensi pengalaman sukses baik dari dalam maupun luar negeri. Daerah otonom menjadi unit pusat pengembangan koperasi kredit sehingga terdapat semacam “*district’s central bank of microcredit/cooperatives*”. Tugas lembaga ini tiada lain adalah dalam hal pengaturan likuiditas dan pengawasan terhadap koperasi primer anggotanya. Proses kapitalisasi koperasi oleh pemerintah (pemerintah daerah) dapat dijalankan melalui lembaga ini. Lembaga ini dapat berbentuk koperasi pusat dan dalam pendiriannya tidak diijinkan memberikan pinjaman kepada siapapun kecuali anggotanya, sehingga keanggotaan akan mengikat syarat kualitas pengelolaan koperasi yang disyaratkan oleh koperasi pusat. Dalam hal daerah ingin mengikut sertakan modalnya dapat dalam bentuk “modal penyertaan” dalam format UU 25/1992 atau “saham” sesuai pemikiran baru yang berkembang. Basis pelayanan kredit melalui koperasi ini dapat dijalankan dengan kerangka pengembangan yang luas dan tidak selalu terikat dengan pembagian wilayah administratif seperti desa, kecamatan dan sebagainya namun dapat diselenggarakan secara kompetitif pada tempat kedudukannya. Untuk maksud efisiensi dan penguatan antara daerah kabupaten dan kota yang berada dalam suatu kawasan pemusatan koperasi disatukan saja. Masing-masing daerah kepentingannya dapat ditampung dalam suatu Dewan Pengarah yang mewakili seluruh *stakeholder* bagi pengembangan koperasi atau semacam *Area Cooperative Development Council*.

Koperasi-koperasi yang lain yang sudah ada seyogyanya didorong untuk senantiasa melakukan restrukturisasi menuju basis bisnis dan keanggotaan yang kokoh. Bagi koperasi yang dominasi kegiatannya berat pada suatu kegiatan simpan pinjam sekaligus diarahkan menjadi koperasi tunggal usaha keuangan. Jenis koperasi lain dikembangkan pada arah koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa sesuai kebutuhan dan atas dasar prinsip kerjasama pasar pada lapangan permainan yang sama. Dasar-dasar pengembangan ini selalu atas dasar sukarela dan kesepakatan koperasi yang bersangkutan, karena lingkungan peraturan perundangan juga sedang berubah yang menuju kepada tiga hal: penyeteraan badan usaha dan badan hukum koperasi; pelaksanaan dan pengawalan pelaksanaan prinsip dan nilai koperasi sebagai badan usaha yang memiliki karakter dan konten sosial, penggarisan peran yang jelas hubungan antara pemerintah dan gerakan koperasi serta masyarakat sebagai *stakeholder*.

Komponen kedua yang perlu dikembangkan adalah pengerahan dana murah masyarakat secara luas melalui pengembangan berbagai sistem jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan (kelaparan/kurang gizi), kesehatan dan pendidikan. Hal ini antara lain melalui pengembangan sistem jaminan sosial bagi penduduk miskin dan para pekerja di sektor informal, termasuk lembaga Amil Zakat yang dilaksanakan masyarakat. Disarankan sistem ini dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial mikro atau *micro social insurance system* yang terbukti telah sukses di banyak negara. Sistem ini akan melindungi rakyat dan pelaku ekonomi rakyat dari ketidak pastian karena tidak dapat bekerja. Dalam sistem syariah (baca: bagi hasil) sistem ini dipandang lebih menjamin kepastian jangka panjang dan dapat dikaitkan dengan gerakan kembali untuk mengurangi resiko sistem financial yang ada misalnya pengenalan kembali standar emas dalam bentuk *dinar* dan *dirham*

sebagai instrument pembayaran zakat atau tabungan jangka panjang seperti tabungan haji dan lain-lain.

Indonesia pada dasarnya tidak menghadapi ancaman ketahanan pangan dalam arti penyediaan tetapi justru diprediksikan menghadapi ancaman ketahanan pangan dalam arti ketahanan daya beli (akses) yang merata Pertanian di daerah (perdesaan) dengan demikian harus diorientasikan pada optimalisasi mikro pada usahatani untuk meningkatkan pendapatan petani baik jangka pendek maupun jangka panjang Penilaian program secara makro harus didasarkan pada landasan keunggulan komparatif dan prinsip keterbukaan. Oleh karena itu untuk menjamin kepentingan jangka panjang harus dipikirkan terutama ketersediaan dana jangka panjang yang murah. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan program pengembangan dan penciptaan aset masyarakat luas.

Salah satu kegiatan yang dapat memenuhi maksud ini adalah pengembangan *agroindustsy* dan *agroforetry* berbasis perdesaan untuk mendukung kelangsungan ekosistem yang baik disertai dukungan untuk menjaga kelangsungan industri kerajinan rakyat di bidang manufacturing. Masing-masing daerah dan perdesaan misalnya, dapat membuat gerakan menanam sejuta pohon khas daerah seperti: jati, mahoni, cendana, meranti, eboni dan lain-lain. Perkebunan hutan rakyat ini bila disertai dengan peningkatan dokumentasi persyaratan legal (sertifikat tanah, notarisasi perjanjian kerjasama dan sertifikasi apresiasi nilai oleh lembaga yang kompeten) akan menambah nilai aset dan kemampuan sektor perdesaan untuk menarik dana perbankan dari luar oleh wirausaha di desa. Sektor kegiatan lain yang secara cultural diyakini oleh masyarakat sebagai instrument tabungan dan penciptaan aset adalah usaha-ternak, karena usaha ternak dipandang sebagai pilar lain penciptaan aset masyarakat menuju pertanian berkelanjutan, perbaikan mutu gizi dan dapat dikerjakan bersama dengan kegiatan *agroforestry*. Perbaikan lingkungan, penanggulangan kemiskinan, sistem jaminan kesehatan dan bea siswa untuk program pendidikan adalah termasuk dalam empat program yang dapat dijadikan instrument untuk *dept swap*. Dengan demikian kita juga membangun kemampuan masyarakat untuk menyangga masa depan bangsa dalam membayar hutang atau membeli aset Negara yang terjual dan berkepentingan langsung dengan nasib penduduk seperti perkebunan, prasarana atau lembaga keuangan.

Sebagai suatu gerakan, sebaiknya kegiatan dilakukan berangkat dari daerah (perdesaan) dan bekerjasama dengan daerah. Sebagai proponen gerakan, maka dianjurkan untuk membangun kerjasama dengan daerah dan gerakan ini juga dapat dimulai dengan skala masyarakat. Model-model keberhasilan perlu diciptakan dengan daerah-daerah terpilih, karena pada dasarnya hal ini adalah merupakan inisiasi dari pembangunan wilayah (*regional development*). Karena ini akan kepentingan semua lapisan masyarakat maka pegiat lembaga kemasyarakatan, gerakan koperasi, dunia perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah serta politisi harus diyakinkan dan menjadikannya sebagai agenda bersama mereka. Katakuncinya adalah: **“perkuat daerah dalam kerangka pembangunan wilayah, kelembagaan dan lembaga keuangan mikro, penciptaan aset dan kemandirian”** masyarakat, daerah (perdesaan) dan bangsa,.

Para penggagas dan pendukung dari gerakan semacam ini dapat melaporkan pengalamannya dari masing-masing contoh, baik pada skala mikro hingga pada skala daerah. Oleh karena itu pertemuan periodik tahunan dapat diprogramkan bersama kegiatan gerakan lainnya untuk memberikan evaluasi. Media semacam ini secara teratur akan membangkitkan semangat baru untuk memperbaharui, memperbaiki dan meningkatkan gerakan ini. Dalam jangka lima tahunan sebuah konferensi besar perlu digelar untuk mendokumentasi dan sekaligus membuat proyeksi jangka panjang sepuluh atau duapuluh tahun mendatang apakah gerakan ini telah melahirkan secercah harapan baru bagi Indonesia yang bebas kebodohan, kemiskinan dan rakyat mampu membebaskan negeri ini dari hutang.

Pada akhirnya wujud dari politik pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial akan ditentukan pada tingkat pelaksanaannya. Tanpa mempersoalkan sesuatu yang telah disepakati bahwa perekonomian Indonesia dibangun melalui mekanisme pasar yang sehat, maka peran perwujudan keadilan sosial diatur dalam suatu sistem hukum yang merupakan produk kesepakatan politik atas dasar demokrasi. Di antara kedaulatan politik dan kedaulatan pasar dalam kenyataannya masih menyisakan suatu tatanan sosial yang dapat saja kondusif, belum siap hingga perlunya menampung pranata khusus dalam sistem pasar. Oleh karena itu demokrasi ekonomi akan mampu membawa pada hasil pembangunan pada tingkat realitas bila menampung dasar-dasar dimaksud serta menampung keikutsertaan segenap lapisan masyarakat. Kebinekaan budaya mengajarkan pada keharusaan untuk melihat pada titik akar yang paling dekat dengan mereka, oleh karena itu daerah dapat menjadi dasar untuk mencapai keragaman pendekatan dalam satu tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat.

PELAJARAN KEDEPAN

Dengan memahami ekonomi rakyat sebagai bentuk kegiatan ekonomi dalam sektorkegiatan yang ada maka sistem pasar yang berlandaskan demokrasi ekonomi akan mampu membawa perumusan kebijakan yang menampung aspirasi pelaku terbesar. Format politik ekonomi dalam kerangka sistem keuangan baru pasca UU 23/1999 menempatkan instrument kebijakan fiscal menjadi titik sentral pemihakan pemerintah nasional dan daerah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Menempatkan daerah sebagai strategi dasar pemberdayaan dengan dukungan lembaga keuangan lokal terutama lembaga keuangan milik masyarakat, koperasi, maka akan terjadi arus aliran modal yang seimbang dan efisien. Penguatan pelayanan jaminan sosial dan penciptaan aset masyarakat adalah instrument penting membangun kemandirian jangka panjang. Jalan ini diyakini dapat menjadi model pembangunan ekonomi berkeadilan sosial.

V

Wajah Koperasi Tani dan Nelayan di Indonesia Suatu Ilustrasi

Meskipun koperasi pertanian pernah menjadi model pengembangan pada tahun 1960an hingga awal tujuh puluhan, namun pada dasarnya koperasi pertanian di Indonesia diperkenalkan sebagai bagian dari dukungan terhadap sektor pertanian. Sejak dahulu sektor pertanian di Indonesia selalu didekati dengan pembagian atas dasar sub-sektor seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Cara pengenalan dan pergerakan koperasi pada saat itu mengikuti program pengembangan komoditas oleh pemerintah. Sehingga terlahir koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi karet, koperasi nelayan dan lain-lain. Dua jenis koperasi yang tumbuh dari bawah dan jumlahnya terbatas ketika itu adalah koperasi peternakan sapi perah dan koperasi tebu rakyat. Kedua-duanya mempunyai ciri yang sama yaitu menghadapi pembeli tunggal pabrik gula dan konsumen kota.

Pada sub-sektor pertanian tanaman pangan yang pernah diberi nama “pertanian rakyat” praktis menjadi instrument untuk menggerakkan pembangunan pertanian terutama untuk mencapai swasembada beras. Hal serupa juga di ulang oleh pemerintah Orde Baru dengan mengaitkan dengan pembangunan desa dan tidak lagi terikat ketat dengan Departemen Pertanian seperti pada masa Orde Lama dan awal Orde Baru. Tugas koperasi pertanian terutama pupuk, membantu pemasaran yang kesemuanya berkaitan dengan program pembangunan sektor pertanian dan “pengerakannya” kepada koperasi selalu apabila gagal dilaksanakan sendiri atau langsung oleh pemerintah, contoh padi sentra, kredit BIMAS hingga distribusi pupuk.

KUD sebagai koperasi berbasis wilayah jumlahnya hanya 8620 unit dan pendiriannya memang tidak terlalu luas. Hingga menjelang dicabutnya Inpres 4/1984 KUD hanya mewakili 25% dari jumlah koperasi yang ada ketika itu, namun dalam hal bisnis mereka mewakili sekitar 43% dari seluruh volume bisnis koperasi di Indonesia. KUD meskipun bukan koperasi pertanian namun secara keseluruhan dibandingkan koperasi lainnya tetap lebih mendekati koperasi pertanian dan karakternya sebagai koperasi berbasis pertanian juga sangat menonjol. Diantara koperasi yang ada di Indonesia yang jumlahnya pada saat ini lebih dari 103 ribu unit, KUD termasuk yang mempunyai jumlah KUD aktif tertinggi yaitu 92% atau sebanyak 7931 unit KUD pada saat ini tidak berbeda dengan koperasi lainnya dan tidak memperoleh *privilege* khusus, tidak terikat dengan wajib ikut program sektoral, sehingga pada dasarnya sudah menjadi koperasi otonomi yang memiliki rata-rata anggota terbesar.

Koperasi pertanian yang digerakan melalui pengembangan kelompok tani setelah keluarnya Inpres 18/1998 mempunyai jumlah yang besar, namun praktis belum memiliki basis bisnis yang kuat dan mungkin sebagian sudah mulai tidak aktif lagi. Usaha mengembangkan koperasi baru di kalangan tani dan nelayan selalu berakhir kurang

menggembirakan. Mereka yang berhasil jumlah terbatas dan belum dapat dikategorikan sebagai koperasi pertanian sebagai mana lazimnya koperasi pertanian di dunia atau bahkan oleh KUD khusus pertanian yang ada.

POSISI PERTANIAN : KINI DAN KE DEPAN

Posisi sektor pertanian sampai saat ini tetap merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dengan sumbangan terhadap pembentukan produksi nasional yang kurang dari 19%. Jika dimasukkan keseluruhan kegiatan *off farm* yang terkait dan sering dinyatakan sebagai sektor agribisnis juga hanya mencakup 47%, sehingga dominasi pembentukan nilai tambah juga sudah berkurang dibandingkan dengan sektor-sektor di luar pertanian. Isue peran pertanian sebagai penyedia pangan, bentuk ketahanan pangan juga menurun derajat kepentingannya.

Ditinjau dari unit usaha pertanian terdapat 23,76% juta unit atau 59% dari keseluruhan unit usaha yang ada. Di sektor pertanian hanya terdapat 23,76% juta usaha kecil dengan omset dibawah 1 miliar/tahun dimana sebagian terbesar dari usaha tersebut adalah usaha mikro dengan omset dibawah Rp. 50 juta/thn. Secara kasar dapat diperhitungkan bahwa hanya sekitar 670 ribu unit usaha kecil di sektor pertanian yang bukan usaha mikro, oleh karena itu daya dukungnya sangat lemah dalam memberikan kesejahteraan bagi para pekerja. Sementara itu penguasaan tanah berdasarkan sensus pertanian 1993 sekitar 43% tanah pertanian berada di tangan 13% rumah tangga dengan kepemilikan diatas 1 hektar saja. Sehingga petani besar sebenarnya potensial dilihat sebagai modal untuk menjadi lokomotif pembangunan pertanian.

Problematika sektor pertanian di Indonesia yang akan mempengaruhi corak pengembangan koperasi pertanian dimasa depan adalah issue kesejahteraan petani, peningkatan produksi dalam suasana desentralisasi dan perdagangan bebas. Bukti empiris di dunia mengungkapkan bahwa pertanian keluarga tidak mampu menopang kesejahteraan yang layak serta dengan sektor lainnya dalam suasana perdagangan bebas. Tema ini menjadi penting untuk melihat arah kebijakan pertanian dalam jangka menengah dan panjang, terutama penetapan pilihan sulit yang melilit sektor pertanian akibat berbagai Rasionalisasi. Kelangsungan hidup koperasi pertanian dimasa lalu sangat terkait politik reservasi tersebut, dan kedepan hal ini juga akan sangat menentukan.

Untuk melihat posisi koperasi secara kritis perlu didasarkan pada posisi sektor pertanian yang semakin terbuka dan bebas. Dengan dasar bahwa proses liberalisasi perdagangan yang berdampak pada sektor pertanian dalam bentuk dihapuskan kebijakan perencanaan pertanian yang kaku dan terpokus. Sehingga pengekan program pembangunan pertanian tidak mungkin lagi dijalankan secara bebas, tetapi hanya dapat dilakukan secara lokal dan harus sesuai dengan potensi lokal. Oleh karena itu prinsip pengembangan pertanian akan lebih bersifat *insentif driven* ketimbang *program driven* seperti di masa lalu. Dengan demikian corak koperasi pertanian akan terbuka tetapi untuk menjamin kelangsungan hidupnya akan terbatas pada sektor selektif yang memenuhi persyaratan tumbuhnya koperasi.

SKETSA KOPERASI PERTANIAN DI MASA DEPAN

Perkembangan koperasi pertanian ke depan digambarkan sebagai “restrukturisasi” koperasi yang ada dengan fokus pada basis penguatan ekonomi untuk mendukung pelayanan pertanian skala kecil. Oleh karena itu konsentrasi diri umum koperasi pertanian di masa depan adalah koperasi kredit perdesaan, yang menekankan pada kegiatan jasa keuangan dan simpan pinjam sebagai ciri umum. Pada saat ini saja hampir semua KUD, unit simpan pinjam telah menjadi motor untuk menjaga kelangsungan hidup Koperasi. Sementara kegiatan pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil menjadi sangat selektif. Hal ini akan terkait dengan struktur pertanian dan pasar produk pertanian yang semakin kompetitif, termasuk jasa pendukung pertanian (jasa penggilingan dan pelayanan lainnya) yang membatasi insentif berkoperasi.

Koperasi nelayan karena kekuatan utamanya terletak pada kekuatan monopoli penguasaan pendaratan dan lelang oleh pemerintah, akan sangat di tentukan oleh policy daerah hak itu akan diberikan kepada siapa? Pemerintah daerah juga potensial untuk melahirkan pesaing baru dengan membangun pendaratan baru. Dengan pengorganisasian atas dasar kesamaan tempat pendaratan pada dasarnya kekuatannya terletak pada daya tarik tempat pendaratan. Persoalan yang dihadapi koperasi nelayan ke depan adalah alih fungsi dari “nelayan tangkap” menjadi “nelayan budaya”, karena hampir sebagian terbesar perairan perikanan pantai sudah di kategorikan overfishing. Fenomena ini juga terjadi dinegara seperti Canada, Korea Selatan dan Eropa dimana koperasi nelayan sedang menghadapi situasi surut.

Koperasi perkebunan tetap mempunyai prospek yang bagus terutama yang terkait dengan industri pengolahan. Namun dalam situasi kesulitan menarik investasi karena kurangnya insentif, kebangkitan ini akan tertunda. Potensi besar sektor perkebunan untuk memanfaatkan kelembagaan koperasi dapat direalisasi dengan dukungan restrukturisasi status aset anggota dalam koperasi atau pengenalan konsep “saham” sebagai *equity* dibandingkan ”simpanan” yang tidak *transferable*.

Untuk kegiatan pertanian lainnya agar lebih berhati-hati untuk mengenalkan konsep koperasi ke dalam kegiatan pertanian. Persyaratan usaha masing-masing anggota, kesesuaian struktur pasar dan keterkaitan jangka panjang antara bisnis anggota dan kegiatan koperasi akan tetap menjadi pertimbangan kepentingan untuk menumbuhkan koperasi pertanian. Pada akhirnya daerah otonom sebagai suatu kesatuan administrasi harus dilihat sebagai basis pemusatan koperasi.

VI

Koperasi Produsen Susu Sebagai Model Klaster Agroindustri Peternakan: Suatu Ilustrasi

Sejarah panjang gerakan koperasi di dunia, terutama koperasi yang bergerak di sektor pertanian, di manapun selalu menampilkan koperasi produsen susu atau koperasi peternak sapi perah sebagai contoh keberhasilan. Contoh ini selalu benar di manapun dan pada saat apapun serta dalam sistem perekonomian apapun, paling tidak kemajuan relative dibandingkan dengan keberhasilan koperasi yang lain di tempat atau negeri yang sama. Ungkapan ini pantas menjadi renungan dan bahan analisis untuk mencari sumber kekuatan koperasi dari pengalaman empiris.

Peternakan sapi perah mempunyai ciri yang berbeda dengan usaha pertanian lainnya karena mempunyai kecenderungan terjadinya aglomerasi yang tinggi dalam lingkungan atau kawasan tertentu. Kemudian dari kawasan tersebut melahirkan berbagai kegiatan terkait baik dalam sistem pendukung maupun outlet (jaringan keluar). Isolasi tidak pernah menjadi hambatan, bahkan sangat sering menjadi kekuatan untuk melahirkan lembaga yang membuka kepentingan para peternak secara bersama-sama. Oleh karena itu lembaga koperasi dapat tumbuh secara kokoh dibandingkan pengorganisasian koperasi yang bergerak pada kegiatan ekonomi lainnya.

Ciri-ciri sebagaimana dikemukakan diatas memberikan penjelasan untuk melihat lebih jauh kehadiran dan potensi koperasi produsen susu di Indonesia untuk berkembang lebih lanjut terutama dalam membawa kehidupan peternakan sapi perah untuk dapat memenuhi misinya dalam perekonomian nasional. Karakter industri persusuan yang lekat dengan kehadiran koperasi seharusnya menjadi dasar pengembangan industri persusuan nasional

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pada awalnya hanya berupa usaha rumah tangga. Baru pada 1994 berdiri Gabungan Petani Ternak Sapi Perah Pengalengan (GAPPSIP) yang juga merupakan koperasi peternak pertama di Indonesia. Pada tahun 1962 berdiri koperasi peternak di Malang bernama SAE Pujon. Menariknya, bahwa pendirian koperasi-koperasi susu ini tidak lepas dari peran para dokter hewan yang bertugas di daerah tersebut. Dikarenakan buruknya situasi sosial ekonomi dan politik, pada tahun 1963 GAPPSIP terpaksa tutup. Akibatnya tata niaga susu di Pangalengan dikuasai oleh para tengkulak dan peternak kuat. Baru pada tahun 1969 di tempat yang sama kembali berdiri koperasi susu dengan nama baru yaitu Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) yang juga diprakarsai oleh seorang dokter hewan, yaitu drh Damawan Danuwijaya.

Walau telah berdiri beberapa koperasi persusuan, namun produksi susu nasional hingga tahun 1978 berkembang dengan sangat lambat. Perjalanan koperasi persusuan di Indonesia jatuh dan bangun dihantam berbagai permasalahan. Disamping masalah

rendahnya kemampuan manajemen koperasi, permasalahan utama yang dihadapi oleh koperasi persusuan adalah dalam hal pemasaran susu kepada industri pengolah susu (IPS). Koperasi susu memiliki posisi rebut tawar yang sangat lemah berhadapan dengan IPS, baik dalam menentukan jumlah penjualan susu, waktu penjualan serta harga yang diperoleh.

Masalah yang dihadapi muncul dikarenakan IPS menggunakan susu impor sebagai bahan baku dan tidak mau menyerap susu domestik. Walau minum susu terus dikampanyekan, permintaan susu murni yang dihasilkan koperasi justru mendapat saingan berat dengan hadirnya berbagai produk susu olahan IPS. Peternak yang telah berhasil diarahkan untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri menjadi kecewa karena banyak susu yang rusak dan harus dibuang.

Titik balik perkembangan koperasi susu Indonesia dimulai pada tahun 1978, dimana terbentuknya Badan Koordinasi Koperasi Susu Indonesia (BKCSI) yang merupakan cikal bakal GCSI yang dibentuk setahun berikutnya. Dengan kelembagaan koperasi persusuan di level nasional, komunikasi antara gerakan koperasi persusuan dengan pemerintah berjalan lebih baik sehingga memungkinkan berperannya subsistem penunjang agribisnis susu di Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi susu sedikit demi sedikit dapat diatasi dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan pemerintah, seperti halnya penetapan kuota impor susu oleh IPS, pengawasan pemerintah terhadap harga susu, penyediaan pakan ternak serta impor sapi perah berkualitas.

Baiknya komunikasi GCSI dengan pemerintah ini dipertegas dengan terbentuknya Tim Koordinasi Persusuan Nasional (TKPN) yang melibatkan tujuh instansi pemerintah. TKPN bertugas memantau perkembangan produksi dan konsumsi susu di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan yang saat itu dipegang oleh orang gerakan koperasi (Daman Danuwijaya) secara *Ex-officio* ditunjuk menjadi ketua TKPN. Posisi ini semakin memungkinkan gerakan koperasi dalam melakukan terobosan yang bersifat lintas sektoral dalam pengembangan agribisnis susu nasional berbasis koperasi.

Share produksi susu dari koperasi terhadap produksi nasional meningkat dari sekitar 17,5% pada tahun 1979 menjadi 92,6% pada tahun 1984. Hal ini tidak terlepas dengan dilaksanakannya kebijakan BUSEP (bukti serap) yang mewajibkan IPS untuk menyerap susu dari koperasi. Dengan kebijakan ini ratio penyerapan susu domestik dapat diperjuangkan menjadi 1:3,5 pada tahun 1984 dari perbandingan 1:20 pada tahun 1979. Dengan pendekatan yang baik terhadap IPS, harga susu di tingkat peternak dinaikkan menyesuaikan tingkat kebutuhan biaya hidup peternak saat itu.

Jumlah koperasi susu yang tadinya hanya 27 buah pada tahun 1979 berkembang 7 kali lipat menjadi 198 pada tahun 1989. Demikian pula terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah tenaga kerja yang terserap pada agribisnis persusuan, baik sebagai peternak pemilik maupun sebagai pekerja.

Namun sayangnya, tren melemah dalam produksi susu terjadi pada dekade 1990an, bahkan disertai menurunnya jumlah peternak dan tenaga kerja yang diserap agribisnis

susu. Hal ini tidak terlepas dari melemahnya peran gerakan koperasi persusuan dalam aktivitas sub-sistem jasa penunjang. Melemahnya peran ini kemungkinan besar dikarenakan melemahnya motivasi individu-individu koperasi persusuan dalam upaya terus meningkatkan kinerja koperasi persusuan dalam upaya terus meningkatkan kinerja koperasi persusuan dalam agribisnis susu nasional.

PROYEKSI PERSUSUAN NASIONAL

Majalah LACTO MEDIA melaporkan bahwa kebutuhan konsumsi susu di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 1,2 juta ton setahun, sedang produksi dalam negeri baru berhasil mencapai sekitar 400.000 ton. Hal ini berarti bahwa setiap tahunnya masih terdapat pasar sebesar 800.000 ton yang dapat diperebutkan dari para pesaing impor yang mengisi kekurangan tersebut. Dengan demikian terbuka kesempatan luas untuk mengembangkan produksi susu secara sehat.

Dilihat dari potensi produksi susu memang pada saat ini memperlihatkan trend yang melemah karena populasi sapi terlihat pada tahun 2000 hanya tinggal 143.626 ekor padahal tahun 1997 menjelang krisis telah mencapai 148.901 ekor. Kemerosotan ini tidak terlepas dari situasi krisis yang menghentikan impor sapi betina karena kalkulasi harganya menjadi kurang layak lagi. Namun jika dilihat dari total sapi betina, selain dewasa termasuk dara dan pedet jumlahnya telah meningkat dari 231.015 ekor pada tahun 1997 menjadi 236.979 ekor pada tahun 2000. Ini berarti potensi pemulihan untuk mencapai tingkat sebelum krisis cukup besar. Dengan gambaran tersebut kendala ekspansi produksi susu adalah ketiadaan sumber investasi untuk membiayai peternakan, terutama penambahan populasi baru.

Dibandingkan dengan usaha pertanian yang berbasis rakyat lainnya, peternakan sapi perah pada dasarnya telah memiliki derajat kemandirian yang lebih tinggi dalam infrastruktur pelayan pengembangan peternakan sudah menjadi milik masyarakat. Bahkan sudah terorganisir secara rapi di dalam koperasi. Sebagai contoh pelayanan kesehatan hewan, penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan serta pengembangan peralatan. Oleh karena itu sebenarnya sudah saatnya melihat industri persusuan dalam konteks bisnis biasa dan cara-cara membantu persusuan nasional sudah mulai dapat dirasionalisasikan. Dengan demikian dasar pengembangan peternakan sapi perah melalui usaha rakyat yang berskala kecil sudah tepat.

Dari berbagai laporan yang disampaikan oleh berbagai penelitian, kendala pengembangan peternakan adalah peningkatan populasi. Disamping sumber dari keterbatasan ini adalah ketergantungan sumber penyediaan induk dari pasokan impor. Jika sasaran pengembangan peternakan sapi perah secara makro adalah peningkatan kapasitas produktif nasional yang mandiri, maka investasi pemerintah seharusnya ditujukan kepada satu jurusan saja yaitu dukungan untuk menghasilkan induk baru yang murah sehingga dalam waktu singkat (s/d2004) populasi sapi betina dapat dinaikkan menjadi dua kali lipat, sehingga selanjutnya dalam dua tahun lagi dapat dinaikkan lagi.

KLASTER BISNIS PETRNAK SUSU

Pendekatan pengembangan industri di Eropa dapat mencapai kejayaannya pada awal abad ke 20 karena digunakan pendekatan klaster (*cluster*) dalam pengembangannya. Pada saat ini di Indonesia telah mengadopsi pendekatan agribisnis sebagai strategi pembangunan pertanian, termasuk peternakan. Agribisnis menekankan keterpaduan berbagai sub-sistem dalam alur kegiatan produksi pertanian. Namun masih menyisihkan pertanyaan apakah sistem pertanian rakyat yang individualistik dalam skala kecil secara mudah dapat di transformasi ke dalam suatu sistem agribisnis yang memerlukan keterpaduan seperti bekerjanya sebuah sistem mekanik. Dalam sejarahnya di Amerika, Philipina dan juga Indonesia semasa penjajahan sistem agribisnis dijalankan oleh sebuah perusahaan industri pertanian.

Pada pendekatan klaster yang ditekankan adalah karakter pengolah pakan atau agribisnis yang kemudian akan melakukan permintaan akan jasa sister pendukung dan kebutuhan outlet dari produk yang dihasilkan. Secara alamiah peternak sapi perah cenderung mengelompok dalam basis agro klimat dan geografis tertentu, sehingga secara alamiah sudah memiliki karakter aglomorasi. Pada tahapan sekarang ini dengan keberadaan koperasi sebenarnya klaster bisnis persusuan telah terbentuk, sehingga yang diperlukan adalah evaluasi kelayakan klaster dan mencari elemen baru untuk revitalisasi industri persusuan yang akan ikut memajukan kehidupan koperasi susu.

Pada tahun 2001 pemerintah telah mengadopsi program pengembangan UKM melalui pendekatan klaster bisnis UKM yang dilaksanakan oleh BPS-KPKM (Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah) yang sekarang ini diintegrasikan ke dalam kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Dalam tahun anggaran 2001 telah terpilih 100 Sentra Bisnis UKM yang akan dikembangkan menjadi sebuah klaster Bisnis UKM yang handal. Ukuran kehandalan yang diharapkan adalah apabila sudah terjadi dinamika pertumbuhan klaster dan semua sistem pendukung dan outlet sudah dapat disediakan oleh masyarakat melalui mekanisme pasar.

Dalam pengembangan Klaster Bisnis tersebut intinya ada tiga pilar dukungan perkuatan yaitu (1). Dukungan non finansial (2). Dukungan finansial; dan (3) dukungan administratif dan lingkungan usaha yang kondusif. Dukungan non finansial selama ini disediakan oleh Pemerintah harus dialihkan kepada masyarakat dan disediakan oleh Pemerintah harus dialihkan kepada masyarakat dan ditumbuhkan menjadi industri jasa layanan pengembangan yang menganut prinsip-prinsip pasar yaitu ada biaya maka harus ada pembayaran sikap jiwa yang meningkatkan nilai bisnisnya. Dalam program BPS-KPKM telah dikembangkan penegasan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) untuk mengembangkan sentra yang ditunjuk dalam rangka meningkatkan akses UKM terhadap teknologi, pasar dan jasa keuangan. Sementara dukungan non finansial lainnya adalah pelatihan bagi tenaga inti dalam rangka pengembangan pilar pengembangan sentra sebagai titik pertumbuhan.

Dukungan perkuatan yang kedua adalah dukungan finansial. Meskipun dukungan ini tetap penting namun harus disadari bahwa “modal adalah penting dalam pengembangan usaha, tetapi modal bukan segalanya”. Oleh karena itu pengembangan dukungan finansial harus tetap menganut prinsip pasar dan harus memperhatikan system perbankan yang menjadi omset utama pasar keuangan. Dalam kaitan pengembangan klaster, dukungan finansial dikembangkan melalui koperasi simpan pinjam, tetapi tetap harus dalam pembinaan lembaga keuangan modern (terutama bank).

Dukungan administrative dan lingkungan usaha dapat diberikan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah yang bertujuan untuk menjamin bekerjanya mekanisme pasar secara sehat dan memberikan iklim yang dapat di predikai oleh pelaku usaha baik peternak sendiri maupun mitra usaha lainnya. Dukungan perkuatan yang memihak diperlukan dalam alokasi sumberdaya pemerintah baik anggaran maupun alokasi sumber daya publik yang lainnya. Untuk yang terakhir ini gerakan koperasi jangan memaksa pemerintah terjebak dalam program-program yang menimbulkan distorsi pasar dan memanjakan sehingga merugikan penguatan daya saing persatuan nasional. Oleh karena prinsip kerangka “*Green Box*” dalam perundingan WTO dapat di jadikan acuan. Pemihakan dapat di wujudkan dalam penyediaan infrastruktur pasar jelas, irigasi, sanitasi, dan perbaikan lingkungan yang sifatnya memberikan perkuatan perbaikan produktivitas jangka panjang dan biayanya besar, sehingga tidak mungkin dikerjakan masyarakat bahwa manfaatnya juga dinikmati oleh publik.

Persyaratan dasar sebuah klaster dapat berkembang secara sehat apabila dijabarkan secara rinci akan meliputi:

- a. Dalam setiap sentra yang akan ditumbuhkan sebagai klaster harus memiliki satu usaha sejenis yang prospek pasarnya jelas, dalam kasus ini adalah peternak sapi perah yang memproduksi susu.
- b. Omset dari keseluruhan unit usaha dalam klaster tersebut paling sedikit Rp. 500 juta,- / bulan. Angka ini akan memungkinkan timbulnya pasar jasa pengembangan yang dapat tumbuh secara sehat, industry pendukung yang terdorong masuk dan pengembangan outlet yang layak. Dari segi finansial dengan total transaksi semacam itu akan menjamin tumbuhnya jasa Perkreditan koperasi yang layak (lihat pengalaman Swamitra-Bukopin).
- c. Telah terjadi sentuhan teknologi yang memungkinkan tercapainya peningkatan produktivitas, karena masalah pokok usaha kecil di bidang pertanian adalah produktivitan/tenaga kerja hanya kurang dari 3% produktivitas usaha besar disektor yang sama, atau hanya 1,5% dari produktivitas usaha menengah. Sentuhan teknologi harus menjadi elemen penting untuk melaksanakan perubahan bagi peternak.
- d. Persyaratan lain yang berkaitan dengan infra-struktur, jaringan pasar, ketersediaan lembaga keuangan dan lain-lain merupakan syarat tambahan yang menyediakan daya tarik klaster bersangkutan.

KOPERASI SUSU DAN KLASTER PETERNAK SAPI PERAH/INDUSTRI SUSU RAKYAT

Koperasi susu pada umumnya memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Klaster Bisnis Susu, dimana koperasi sekaligus berperan sebagai Lembaga Pengembangan Bisnis bagi peternak dan juga sebagai lembaga keuangan bagi mereka sebagaimana diperankan oleh unit Perkrditan/simpan pinjam koperasi susu. Dengan demikian pengembangan kawasan peternakan sapi perah melalui koperasi adalah sebuah model klaster tertutup yang unik dan efektif. Koperasi dapat menjadi “*Entry Point*” dalam peningkatan pengembangan persusuan nasional.

Koperasi sub sektor peternakan terutama peternakan sapi perah apapun kebijakan yang ditempuh akan mampu berkembang dengan karakter koperasi yang kental. Prasyarat untuk memajukan koperasi di bidang persusuan ini dalam menghadapi persaingan global antara lain:

- a. Bebaskan anggota yang ada hingga usahanya minimal skala mikro atau minimal 10 ekor/anggota.
- b. Bebaskan setiap koperasi hingga mencapai satuan yang layak sebagai kluster peternakan minimal 15.000liter/hari dan idealnya menuju pada 100.000liter/hari.
- c. Integrasi untuk konsep pertanian dan peternakan agar menjamin kesatuan unit untuk meningkatkan kepadatan investasi pertanian.

Dengan demikian menggunakan model klaster sebagai strategi dasar maka upaya lanjutan yang diperlukan adalah:

Pertama, meningkatkan omset koperasi dari sekarang sekitar Rp. 165 juta,-/koperasi/bulan menjadi minimal Rp. 500 juta,-/koperasi/bulan atau naik menjadi 3 kali lipat (periksa company profile GKSI). Syarat ini menjadi prioritas koperasi yang dapat dikoordinir secara nasional;

Kedua, tingkat kan skala peternakan anggota dari kondisi saat ini dengan rata-rata omset Rp. 5,2 juta,-/peternak/tahun menjadi minimal 10 kali lipat dari keadaan sekarang agar mereka mulai masuk batas minimal usaha kecil yang bukan usaha mikro yakni dengan menaikkan omset minimal Rp.50 juta,-/tahun bagi setiap peternak dan dalam lima tahun mendatang harus dinaikkan lagi menjadi 10 kali lipat menuju atas bawah usaha kecil menengah (usaha kecil sesuai UU No. 9/1995 memiliki omset dibawah Rp. 1 miliar dapat dikelompokkan ke dalam *Usaha mikro*, omset dibawah Rp. 50 juta,-, *Usaha kecil*, omset antara Rp. 50 juta,-s/d Rp. 500 juta,-, dan *Usaha kecil-menengah*, omset antara Rp. 500 juta,- s/d Rp. 1 miliar.

Ketiga dengan dukungan tersebut setiap prime/GKSI akan mampu tumbuh menjadi klaster industri persusuan yang kuat, sehingga semua sayap bisnis dan jasa koperasi dapat tumbuh dan berkembang.

Dengan strategi semacam ini Primer Koperasi Susu akan disegani dan menjadi mitra bagi kemajuan daerah dan mampu melahirkan peternak kelas menengah yang akan menjadi motor pembangunan pedesaan di masing-masing daerah. Skala ini akan menjamin kelayakan untuk menjadikan koperasi sebagai mekanisme pengatur pembangunan berkesinambungan dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih terjamin.

VII

PENUTUP

Berbagai rangkaian pemikiran PERHEPI, baik dilakukan melalui diskusi, seminar, *round-table*, rapat kerja nasional pada awal hingga menjelang pemerintahan ‘baru’ di tahun 2004 ini telah berusaha dikompilasikan dalam rangkaian tulisan Pembangunan Perdesaan: Rekonstruksi Kelembagaan Ekonomi, sebagaimana wujud buku ini. Beberapa butir penting dikemukakan adalah:

1. Pembangunan pertanian dan perdesaan masa mendatang harus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di perdesaan, yang sekaligus mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi perdesaan melalui kegiatan-kegiatan produktif dan berdaya saing. Masalah kritis saat ini adalah bahwa meningkatnya produksi pertanian (agribisnis) selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan. Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu (*integrated farming system*). Oleh karena itu persoalan membangun kelembagaan (*institution*) di bidang pertanian dalam pengertian yang luas menjadi semakin penting, agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut *on farm business* saja, akan tetapi juga terkait erat dengan aspek-aspek *off farm agribusinessnya*. Dibutuhkan komitmen para pemimpin dalam merekonstruksikan dan merestrukturisasikan pembangunan pertanian mendatang, sehingga petani dan masyarakat perdesaan lebih bermartabat dan sejahtera.
2. Secara spesifik, saat ini beberapa kondisi sekaligus kendala yang dihadapi petani untuk mengembangkan kegiatan usaha produktifnya, adalah (a) Akses yang semakin kurang baik terhadap sumberdaya (*access to resources*), seperti keterbatasan aset lahan, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan produktif lainnya; (b) produktivitas tenaga kerja yang relative rendah (*productive and remunerative employment*), sebagai akibat keterbatasan investasi, teknologi, keterampilan dan pengelolaan sumberdaya yang efisien; (c) Perasaan ketidakmerataan dan ketidakadilan akses pelayanan (*access to services*) sebagai akibat kurang terperhatikannya rangsangan bagi tumbuhnya lembaga-lembaga sosial (*social capital*) dari bawah; (d) Kurangnya rasa percaya diri (*self reliances*), akibat kondisi yang dihadapi dalam menciptakan rasa akan keamanan pangan, pasar, harga dan lingkungan.
3. Fakta yang dihadapi saat ini dalam membangun pertanian (agribisnis) justru banyak ditunjukkan dengan beberapa kasus perdagangan *illegal* dan trend harga komoditas pertanian sangat merugikan petani. Dengan demikian, keberhasilan sebagai program pengembangan produksi pertanian (*on-farm*) yang diupayakan telah dengan mudah dinihalkan kembali oleh kasus-kasus tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya

proses kanibalisme antar sub-sistem dalam system agribisnis berbagai komoditas di Indonesia, dimana petani selalu menjadi korban.

4. *Institutional building* sebagai prasyarat keharusan dalam pengembangan agribisnis yang bagian terbesar pelakunya petani “kecil dan gurem” adalah bangun koperasi dan kelembagaan-kelembagaan lainnya.. Secara substansial, upaya kelembagaan tersebut pada dasarnya dapat dipandang sebagai langkah menuju rekonstruksi ulang dalam penguasaan dan akses sumberdaya produktif di bidang pertanian, terutama berkaitan dengan pengembangan agribisnis. Pada masa lalu, banyak bangun kelembagaan dari berbagai daerah tumbuh sejalan dengan budaya setempat. Namun pada saat kita membangun kekuatan pertanian untuk mencapai swasembada pangan (beras), kelembagaan-kelembagaan tradisional tersebut harus terpinggirkan dan tergantikan oleh kelembagaan baru sebagai instrument untuk mencapai tujuan nasional tersebut.
5. Sebagai suatu *rules* atau nilai dalam pembangunan pertanian dan perdesaan ke depan, seyognya upaya kelembagaan tersebut diharapkan menjadi pendorong penciptanya *the same level playing field* bagi petani dan pelaku ekonomi lainnya, berdasarkan “aturan main” yang *fair, transparent, demokratis* dan adil. Upaya kelembagaan tersebut harus mampu mendorong peningkatan basis sumberdaya, produktivitas, efisiensi dan kelestarian bagi kegiatan-kegiatan produktif pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
6. Koperasi sebagai bangun kelembagaan ekonomi pada dasarnya merupakan salah satu *social capital* untuk melawan ketidakadilan, yang diharapkan menjadi salah satu *trigger* bagi pemberdayaan ekonomi petani di perdesaan. Pada intinya prinsip koperasi adalah memposisikan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasanya, dan termimi-festasikan dalam skema pemilik-pengguna jasa, yang sangat sesuai untuk pengelolaan bidang pertanian dan perdesaan. Oleh karena itulah, di berbagai Negara, koperasi ditempatkan dalam urusan kementerian pertanian.
7. Berbagai kelemahan yang selama ini dipersiapkan masyarakat (petani) terhadap koperasi harus menjadi prioritas dalam mengembangkan kembali jiwa kelembagaan ekonomi ini, karena memang koperasi bukanlah ‘sapu jagat’ Di lain pihak, berbagai *moral hazard* yang selama ini menjadi ‘penyakit’ koperasi harus diantisipasi dalam masa depan . KUD misalnya, tentu memiliki *advantage*, akan tetapi menyurutnya peran lembaga tersebut memerlukan pemahaman *disadvantage*-nya, untuk pemikiran masa depannya.
8. Kelembagaan petani yang ada sekarang hampir semuanya memiliki ketergantungan yang kuat dengan program dan proyek pemerintah. Jarang sekali ditemui suatu kelembagaan pertanian yang secara mandiri tanpa campur tangan dan bantuan pemerintah. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintahan yang baru dan

diambil langkah-langkah pembaharuan agar kelembagaan petani bisa tumbuh dengan lebih mandiri dan dinamis, serta tidak terlalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah. Berbagai ilustrasi dan 'kisah sukses' koperasi pertanian dengan 'kompetensi' yang jelas (misalnya tunggal komoditas dalam rangkaian agribisnis) dapat menjadi pelajaran berharga di masa depan.

9. Restrukturisasi kelembagaan petani harus didasarkan pada kepentingan petani sebagai bagian dari *supply chain* produk pertanian, dan bukan lagi didasarkan pada kepentingan nasional (makro). Sebagai pelaku yang menjadi bagian dari *agri supply chain*, petani membutuhkan keterkaitan dengan pelaku pasar lainnya. Pembentukan kelembagaan petani haruslah dalam konteks mengaitkan petani pada sistem *agri-supply chain* yang ada. Ketidakmampuan petani untuk beradaptasi dan terkait dengan *supply chain* pasar modern, akan menyebabkan masuknya produk pertanian dan malah mungkin produsen/petani dari luar negeri. Rekonstruksi kelembagaan petani yang terpenting adalah membantu (memberdayakan) dan memper-kokoh ikatan mereka dalam suatu kelembagaan yang *innovative* yang menunjang *agri-supply chain* dengan *competency* tertentu, sehingga terbentuk suatu *value chain* yang jelas ditunjang oleh kompetensi yang kuat dari masing-masing pelaku. Dalam kaitan ini, dukungan penguatan keuangan (pembiayaan) dan non-keuangan merupakan aspek penting.
10. Salah satu aspek penting yang senantiasa terabaikan adalah pemberdayaan petani dalam rangka pemenuhan pembiayaan atau permodalan usaha. Mendorong kemampuan petani dalam penyelenggaraan usaha permodalan (perkreditan) pada masa mendatang menjadi semakin penting. Pengembangan koperasi perkreditan pertanian (*Indonesian Credit Union*) perlu perlu pemikiran lebih mendalam dari pengambil kebijakan.
11. Model kelembagaan untuk merestrukturisasikan pertanian dan perdesaan tidak sebatas pada koperasi. Keunikan dan keragaman wilayah dan budaya pada dasarnya merupakan potensi yang harus berkembang, sesuai dengan kebhinekaan Indonesia. Model-model sederhana seperti kelompok usaha pertanian hingga ke korporasi petani (*corporate community*) dapat menjadi cara untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) petani melalui pelonggaran *property rights, capability*, batas-batas yurisdiksi dan aturan representasinya. Untuk ini, dibutuhkan 'pemetaan' yang lebih komprehensif untuk menemukannya model-model kelembagaan petani dan perdesaan di berbagai wilayah, sebagai *social capital* yang akan sangat berperan dalam pembangunan pertanian dan perdesaan mendatang.